

OPTIMALISASI PAKTA AUKUS DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEPENTINGAN KEAMANAN AUSTRALIA

by RICKHAR RUSNAFADILAH

Submission date: 25-Oct-2023 09:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 2200262020

File name: Skripsi_Widya_Sri_Ningsih_Updated.docx (3.3M)

Word count: 12547

Character count: 86386

14
OPTIMALISASI PAKTA AUKUS DALAM Mendukung
PEMENUHAN KEPENTINGAN KEAMANAN AUSTRALIA

HASIL PENELITIAN

6
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)



Disusun Oleh:
WIDYA SRI NINGSIH
NIM. 1702045086

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ¹⁴ Optimalisasi Pakta AUKUS dalam Mendukung Pemenuhan Kepentingan Keamanan Australia

Nama : Widya Sri Ningsih

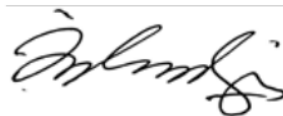
NIM : 1702045086

Program Studi : ⁶ Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Sonny Sudiarta, S.JP., M. Si

NIP. 197503312005011002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktik	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Teori	9
2.2.1. Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>)	9
2.2.2. Keuntungan Relatif (<i>Relative Gains</i>)	12
2.3. Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Fokus Penelitian	19
3.2. Jenis Penelitian	19
3.3. Sumber Data	20
3.4. Teknik Pengumpulan Data	20
3.5. Teknik Analisis Data	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Australia di Indo-Pasifik.....	22
4.2. Ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik	28
4.3. <i>Australia – United Kingdom – United State</i>	34
4.3.1. Pakta Keamanan AUKUS	34
4.3.2. Kepentingan Amerika Serikat dalam Pakta AUKUS	45
4.3.3. Kepentingan Inggris dalam Pakta AUKUS	50

4.3.4. Kepentingan Australia dalam Pakta AUKUS	53
4.4. Optimalisasi Upaya Australia dalam Pemenuhan Kepentingan Keamanan Melalui Pakta AUKUS	59
BAB V PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Rekomendasi	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Indo-Pasifik	23
Gambar 4.2 Peta Geopolitik AUKUS	35
Gambar 4.3 Uranium dan Thorium Australia 2019	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah merayakan 70 tahun aliansi Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Australia pada 1 September 2021, Perdana Menteri Boris Johnson bersama Presiden Joseph Biden dan Perdana Menteri Scott Morrison mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengumumkan pembentukan kemitraan keamanan trilateral yang disebut dengan ¹⁶ AUKUS (*Australia, United Kingdom, United State*) pada 15 September 2021. Melalui pakta keamanan ini, pemerintah ketiga negara akan memperkuat kemampuan untuk mendukung kepentingan keamanan dan pertahanan masing-masing negara serta membangun kerja sama diplomatik yang sudah lama berdiri dan berkelanjutan. Upaya awal ini akan berfokus pada kekuatan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum dan kekuatan bawah laut (The White House, 2021).

Pada dasarnya AUKUS adalah aliansi keamanan trilateral dalam politik internasional tradisional, namun secara historis merupakan satu-satunya aliansi militer multilateral yang muncul di Asia Pasifik selama tiga dekade terakhir (Cheng, 2022). Ketiga negara anggota AUKUS sebelumnya sudah pernah terlibat dalam kerja sama keamanan dan pertahanan bersama. Salah satu yang paling dikenal dan bersifat rahasia adalah *Five Eyes Agreement* bersama Kanada dan Selandia Baru pada tahun 1946 yang membahas mengenai *Signal Intelligence* (NCSC, 2016).

Pengumuman resmi pakta AUKUS yang menjadi perhatian dunia, komitmen persenjataan nuklir, dan penargetan terhadap persaingan tertentu membuat aliansi trilateral ini dilihat sebagai indikasi kemunculan perang dingin bagi negara-negara di dunia khususnya yang berada di kawasan Indo-Pasifik.

Pembentukan aliansi keamanan baru bersama dua negara yang cukup berpengaruh ini dianggap akan menghilangkan sebagian besar kecemasan atas krisis identitas yang dialami Australia sekaligus menjadi mekanisme kerja sama terbesar dan paling aman yang dimiliki Pemerintah Australia. Sebelum pembentukan AUKUS, Australia di bawah kepemimpinan PM Scott Morrison dipandang lebih memprioritaskan hubungan dengan *Anglophone Countries* sehingga menguatkan pandangan bahwa Australia adalah “*Deputy Sheriff*” Amerika Serikat di kawasan, khususnya dalam menghadapi rivalitas Tiongkok (CSIS, 2022). Hal tersebut juga mengakibatkan penurunan drastis hubungan Tiongkok-Australia khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Australia telah meningkatkan investasi secara signifikan di sektor manufaktur tingkat tinggi yang diwakili oleh industri pertahanan. Selain untuk memenuhi kepentingan pembangunan ekonomi dan keamanan nasionalnya, peningkatan investasi tersebut juga dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan Australia pada ekspor sumber daya ke Tiongkok. Di sisi lain, bergabung dengan pakta AUKUS memberi kesempatan kepada Pemerintah Australia untuk memamerkan kekuatan dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan.

Sebagai inisiatif pertama di bawah AUKUS, Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris berkomitmen pada ambisi bersama dalam mendukung Pemerintah Australia memperoleh teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Proses pelingkupan awal untuk bagian perjanjian ini akan memakan waktu 18 bulan (Brooke-Holland et al., 2021). Secara umum, arahan inti dari kemitraan ini adalah untuk menjaga keseimbangan di kawasan Indo-Pasifik dengan menunjang sistem keamanan bawah laut Australia. Pakta ini menandai pertama kalinya Pemerintah Amerika Serikat berbagi tenaga propulsi nuklir dengan sekutu selain Inggris.

Teknologi propulsi nuklir angkatan laut merupakan isu yang sangat sensitif, sebagaimana penggunaannya diatur secara internasional. Berjalannya aliansi ini menjadikan Australia sebagai negara ke-7 di dunia yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Pemerintah Australia berkomitmen akan memenuhi ¹² standar tertinggi untuk tindakan pengamanan, transparansi, verifikasi dan perhitungan terhadap perjanjian non-proliferasi serta keselamatan dan keamanan dari bahan dan teknologi nuklir itu sendiri.

Setelah AUKUS secara resmi diumumkan, muncul berbagai reaksi yang beragam terkhusus di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia, Inggris dan Amerika Serikat meyakini bahwa tindakan tersebut akan membantu mengatasi ketidakseimbangan kekuatan militer dalam melawan Tiongkok. Namun, sebagian besar negara di kawasan memiliki kekhawatiran bahwa pakta keamanan ini akan memicu perlombaan senjata dan meningkatkan risiko konflik. Keputusan Pemerintah Australia untuk bergabung

dengan AUKUS diiringi juga dengan pembatalan secara tiba-tiba terhadap kesepakatan kapal selam dengan Prancis yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Hal ini membuat Prancis mengalami kerugian secara ekonomi hingga sempat memutus hubungan kedua negara pada tahun 2021 (Cheng, 2022).

Skala yang dirasakan dari ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik telah berkembang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, sehingga negara-negara di kawasan termasuk Australia merasa perlu memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman tersebut. Kapal selam bertenaga nuklir dalam konteks ini memiliki jangkauan yang lebih jauh, lebih cepat dan tidak mudah terdeteksi. Alasan utama pembatalan kerja sama dengan Prancis adalah bahwa kapal selam produksi Prancis diperkirakan akan mengalami keterlambatan dalam membantu mengatasi ancaman strategis yang dihadapi Australia (Cheng, 2022). Hal tersebut kemudian meyakinkan Pemerintah Australia untuk mengganti pemasoknya dari Prancis ke Amerika dan Inggris.

Meskipun bergabung dengan AUKUS adalah langkah yang sangat berisiko, namun Pemerintah Australia diyakinkan dengan berpegang pada adanya beberapa alasan yang dianggap dapat menjadi batu loncatan bagi perkembangan teknologi keamanan dan pertahanan angkatan laut. Saat ini, Pemerintah Australia bercita-cita untuk mengubah fokus strategis mereka dan kembali serius dalam rancangan teknologi kapal selam untuk mengejar ketertinggalannya. Pertimbangan Pemerintah Australia untuk mengambil bagian dalam aliansi trilateral ini adalah bahwa Pemerintah Amerika Serikat memiliki kepentingan yang lebih besar dalam melindungi sekutunya di

kawasan Indo-Pasifik yang tergolong sangat penting bagi pemerintahan Joe Biden. Pemerintah Australia melihat langkah ini sebagai tindakan yang paling bijak untuk menjadi batu loncatan ke depan dalam peningkatan kemampuan keamanan dan pertahanannya.

Pemerintah Amerika Serikat mempertaruhkan kepentingannya dalam pakta keamanan ini dengan menjadikan AUKUS sebagai batu loncatan dalam pendekatannya ke kawasan Indo-Pasifik sesuai dengan strategi politik luar negerinya yaitu menciptakan mekanisme keamanan dengan membentuk tata kelola kawasan yang lebih luas. Tidak sulit untuk memahami alasan Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Inggris memutuskan untuk bersedia memfasilitasi peningkatan kemampuan bawah laut Australia. Di satu sisi, Pemerintah Amerika Serikat memiliki sejarah serupa yaitu mengekspor dan mentransfer teknologi militer untuk menggalang pengikutnya (Cheng, 2022). Di sisi lain, fakta bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah mentransfer teknologi militer kontroversial ke Australia meskipun mengetahui bahwa langkah tersebut pasti akan memicu kegemparan internasional, mencerminkan tekadnya untuk mengalihkan fokus strategis ke kawasan Indo-Pasifik.

Baik Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Inggris, maupun Pemerintah Australia memiliki kepentingan dalam pakta keamanan ini. Meskipun demikian, Pemerintah Australia mengalami lebih banyak kecaman atas keputusannya bergabung dengan AUKUS. Oleh karena itu Pemerintah Australia tentu akan memanfaatkan

kesempatan sebagai negara anggota AUKUS untuk sebaik-baiknya mengoptimalkan pemenuhan kepentingan kemanannya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Australia mengoptimalkan pakta AUKUS bagi pemenuhan kepentingan keamanannya?

18

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Australia dalam mengoptimalkan pakta AUKUS bagi pemenuhan kepentingan keamanannya.

18

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan dalam menganalisis studi keamanan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktik

Secara empiris, penelitian ini diorientasikan agar dapat menambah tulisan ilmiah tentang Australia dan keamanan internasional.

33
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai respon negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terhadap aliansi trilateral AUKUS beserta dampaknya. Dalam tulisan ini, penulis memilih untuk menganalisis lebih spesifik mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Australia untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingannya dalam pakta keamanan AUKUS. Untuk itu penulis perlu menjabarkan inti dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar atau referensi dalam penelitian ini.

Penelitian pertama merupakan jurnal oleh Louisa Brooke-Holland, John Curtis dan Claire Mills yang berjudul “*The AUKUS Agreement*” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesepakatan antara Pemerintah Australia, Inggris dan Amerika Serikat yang mengacu pada pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia serta bekerja sama di berbagai bidang seperti dunia maya dan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membantu mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa bergabungnya Australia dengan pakta ini akan memicu perlombaan senjata dan meningkatkan risiko konflik di kawasan. Di sisi lain bergabungnya Australia dengan AUKUS mengakibatkan Prancis kehilangan kontrak multimiliar dalam membangun kapal selam konvensional untuk Australia dan menyebut hal tersebut sebagai pengkhianatan (Brooke-Holland et al., 2021).

Penelitian kedua dari Jurnal *Dinamika Global* oleh Mariane Olivia Delanova dengan judul “Dampak Pakta Pertahanan AUKUS terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana perbedaan kepentingan secara kecenderungan untuk menunjukkan pengaruh yang kuat dari masing-masing pihak tanpa keberanian untuk menerima konsekuensi *Powers Politics* yang sedang berlangsung, dapat mendorong kekhawatiran dan ketidakpercayaan negara lain atas komitmen negara-negara yang terlibat dalam aliansi AUKUS. Langkah Pemerintah Australia dalam rangka meningkatkan kapabilitas keamanannya dapat dianggap sebagai peringatan bagi Tiongkok agar mematuhi aturan internasional yang ada.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun banyak kekhawatiran yang timbul, namun selama Pemerintah Australia menggunakan kapasitas kapal selam tersebut tanpa adanya intensi untuk bertindak secara agresif maka kekhawatiran yang ada harus bisa dihilangkan. Melalui *refocusing* Amerika Serikat, upaya Pemerintah Inggris sebagai aktor eksternal cukup memiliki pengaruh untuk menjadi lebih terlibat di Kawasan Indo-Pasifik (Delanova, 2021).

Penelitian ketiga dari *European Journal of Development Studies* oleh M. Cheng dengan judul “AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan mengenai dinamika perubahan yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik sebagai dampak dari AUKUS. Berbagai negara memberikan respon yang beragam terkait kemunculan aliansi keamanan tiga negara tersebut, namun

ASEAN secara umum memandang hal tersebut sebagai fenomena yang membuat situasi geopolitik di kawasan menjadi memburuk. Bergabungnya Pemerintah Australia dalam pakta keamanan ini bukanlah keputusan yang bijak karena telah mengganggu tatanan di kawasan dengan menimbulkan potensi perlombaan senjata, meningkatkan ketegangan regional dan berpotensi melakukan tindakan yang melanggar perjanjian nonproliferasi senjata nuklir.

Penelitian ini juga membahas latar belakang di balik terbentuknya pakta tersebut. Pemerintah Amerika Serikat selaku inisiator, memanfaatkan AUKUS dalam pendistribusian kembali kekuatannya dengan memberdayakan sekutunya untuk memperkuat pengaruh militernya di Indo-Pasifik. Sebagai respon dari terbentuknya aliansi keamanan baru di kawasan, Tiongkok melihat dirinya sebagai target pengelompokan baru (Cheng, 2022).

2.2.Landasan Teori

12 **2.2.1. Kepentingan Nasional (*National Interest*)**

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep klasik dalam teori hubungan internasional dan juga sebuah konsep yang digunakan sebagai patokan dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Tanpa adanya keyakinan terhadap identitas nasionalnya, negara tidak akan mampu mendefinisikan kepentingan nasional mereka. Sebagai hasilnya kepentingan komersial subnasional dan kepentingan etnis

transnasional maupun non-nasional akan mendominasi kebijakan luar negeri (Rizky Mardhatillah Umar, 2017).

Kepentingan nasional merupakan akar dari ambisi negara dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, budaya dan sebagainya. Negara menggunakan kepentingan nasional untuk mengejar *power*, kemudian menggunakan *power* untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh karena itu menurut Machiavelli, kepentingan nasional adalah sesuatu yang sangat dekat dengan *power*.

Kepentingan nasional terbagi menjadi enam jenis menurut Thomas W. Robinson, di antaranya: *Primary Interest* merupakan kepentingan perlindungan politik, wilayah dan kebudayaan dari gangguan eksternal. *Secondary Interest*, kepentingan untuk melindungi warga negara yang berada di negara lain. *Permanent Interest*, kepentingan yang tetap dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang. *Variable Interest*, yaitu kepentingan yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pertimbangan. *General Interest*, kepentingan umum yang dapat diberlakukan oleh banyak negara. *Spesific Interest*, adalah kepentingan khusus yang menyesuaikan dengan waktu dan tempat. Dalam hal ini kepentingan nasional yang ingin dicapai Pemerintah Australia melalui AUKUS dapat dikategorikan sebagai *Primary Interest* dan *Permanent Interest*.

Kepentingan nasional umumnya berisi tentang pernyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan domestik negara yang akan dipenuhi melalui hubungan luar negeri baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan ini kepentingan nasional merupakan fondasi utama yang akan dibawa dalam sebuah kerja sama dengan negara

lain. Beberapa menyangkal pernyataan bahwa kepentingan nasional harus memainkan peran utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri, namun pernyataan tersebut merupakan yang paling banyak diyakini oleh para diplomat dan pemimpin negara (Buchanan, 2005). ²¹ Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan sebuah negara untuk melindungi serta mempertahankan identitas fisik, politik dan budaya dari gangguan negara lain. Bagi para pemimpin negara, kepentingan nasional ³² dapat dijadikan alat untuk membuat kebijakan spesifik terhadap negara lain baik yang bersifat kerja sama maupun konflik. Hans menegaskan bahwa kepentingan nasional harus menjadi satu satunya penuntun, dasar pemikiran dan tindakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Secara harfiah pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap keputusan kebijakan luar negeri dapat mempengaruhi kepentingan nasional dengan berbagai cara.

Meskipun keputusan kebijakan luar negeri diarahkan untuk melanjutkan atau mengubah hubungan antara negara dan lembaga atau aktor lain di luar batas negara, bisa saja ditemui keadaan di mana terdapat kebijakan luar negeri tertentu yang mengarah pada kepentingan nasional mungkin sangat berbahaya atau menjadi ancaman bagi beberapa warga negara. Sebagai contoh, ada suatu kebijakan luar negeri yang dibuat demi kepentingan nasional namun mengorbankan sekelompok warga negara yang sedang dipenjara secara tidak adil oleh kekuatan asing (Buchanan, 2005).

³⁹ Kepentingan nasional dari suatu negara dapat dikonstruksi secara sosial dengan ³¹ kondisi yang terjadi di masyarakat internasional, yang artinya kepentingan nasional

senantiasa terbentuk, bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan struktur politik internasional. Dalam hal ini kerja sama trilateral AUKUS terbentuk dengan didasari kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Pemerintah Australia, Inggris dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan dan pertahanan.

2.2.2. Keuntungan Relatif (*Relative Gains*)

Negara telah mempraktikkan kerja sama jauh sebelum Thucydides membahas diplomasi, perjanjian dan aliansis sejak ribuan tahun yang lalu. Secara tradisional, kerja sama internasional didefinisikan sebagai situasi di mana para aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan kondisi aktual atau preferensi yang diantisipasi oleh pihak lain melalui suatu proses koordinasi kebijakan. Kerja sama internasional tidak hanya sekedar aksi yang dilakukan oleh sebuah negara, melainkan proses berulang yang berkelanjutan dan proses yang dapat mendorong transformasi lebih luas dari sistem internasional.

Secara khusus kerja sama internasional telah didefinisikan sebagai penyesuaian kebijakan yang disengaja dan terkoordinasi oleh negara-negara yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ataupun mencapai keuntungan bersama. Dalam beberapa tahun terakhir, teori kerja sama internasional telah memberikan perhatian yang cukup besar pada 3 tema substantif di antaranya aktor non negara, norma dan gagasan transnasional dan efektivitas kerja sama (O'Neill et al., 2004).

²⁷ Aktor non negara semakin memainkan peran penting dalam kerja sama internasional di antaranya organisasi internasional, gerakan sosial transnasional, industri swasta dan komunitas epistemik. Hal tersebut menunjukkan pengikisan otoritas negara bangsa sebagai unit analisis utama dalam hubungan internasional. Literatur terbaru tentang norma dan gagasan telah menentang analisis konvensional kerja sama internasional yang menyatakan bahwa kekuatan material merupakan satu-satunya variabel yang relevan dengan tindakan negara, kepentingan nasional dan preferensi.

Norma dan gagasan transnasional juga berperan penting untuk menciptakan kerja sama yang bertahan lama. Selanjutnya adalah efektivitas kerja sama, pertanyaan dalam bidang studi ini menyangkut seberapa baik negara mematuhi perjanjian. Kemudian aspek terakhir yaitu tindakan yang dilakukan negara untuk mengimplementasikan kerja sama dan sejauh mana perjanjian tersebut mampu menyelesaikan masalah yang seharusnya ditangani negara. Keberlangsungan dihasilkan dari hasil kerja sama yang ditransformasikan ke politik domestik.

Meningkatnya persaingan antara teori *state centric* dan proliferasi aktor non negara dalam politik internasional telah menggerakkan para sarjana HI untuk menganalisis keberagaman aktor internasional termasuk *International Government Organization* (IGO), *No Government Organization* (NGO), gerakan sosial transnasional, *Multi National Corporation* (MNC) dan komunitas keilmuan. Kerja sama internasional melibatkan perilaku negara yang kolektif serta selalu memiliki

tujuan dan aktor-aktor non negara yang usahanya membentuk dan dibentuk oleh kekuatan material dan non material.

Evolusi teori kerja sama internasional secara garis besar mencerminkan pergeseran teoretik dan epistemologis dalam bidang umum hubungan internasional. Tinjauan kerja sama sebagai proses literasi memerlukan lebih banyak pemahaman mengenai sifat dan hubungan antara aktor internasional dan lingkungan mereka. Menurut realisme, kerja sama dapat terjadi ketika negara sedang memainkan permainan koordinasi seperti bersekutu melawan ancaman umum atau memiliki standar telekomunikasi.

Teori kerja sama internasional menjelaskan lebih lanjut bahwa lembaga internasional mungkin berfungsi untuk memperpanjang bayangan masa depan dengan mengatur interaksi dan untuk memfasilitasi aliran informasi. Bayangan masa depan yang lebih panjang akan membuat kerja sama lebih berkelanjutan. Analisis ini menjelaskan bahwa meskipun bayangan lebih jauh tentang masa depan dapat memaksa penegakan perjanjian internasional menjadi lebih mudah, hal itu juga dapat memberikan negara kesempatan lebih besar dan kuat dalam penawaran serta menunda kesepakatan dengan maksud mendapatkan hasil yang paling menguntungkan (Barrett, 1999). Terlepas dari apa yang menjadi tujuannya, pembuat kebijakan perlu mengkoordinasikan kebijakan negara dan tindakan birokrasi yang relevan jika ingin mendapatkan berbagai manfaat dari kerja sama secara maksimal.

Realisme menyebutkan bahwa dalam sebuah kerja sama internasional ada dua hal yang menjadi perhatian, yaitu keuntungan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam sebuah kerja sama antar negara terdapat berbagai macam kondisi yang mungkin terjadi, di antaranya *absolute gains*, *relative gains* dan *loss*. Sebuah kondisi disebut *absolut gains* apabila dalam suatu kerja sama semua pihak ingin mencapai kepentingan dan keuntungan yang sama dengan negara lain sehingga semua pihak memperoleh keuntungan secara merata. Kondisi tersebut sering terjadi pada sebuah kerja sama dalam bidang ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan *relative gains* yaitu kondisi di mana selain ingin mencapai kepentingannya, negara juga ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari negara lain dan cenderung mendominasi keuntungan yang akan didapatkan dalam kerja sama tersebut.

Kondisi *relative gains* lebih mungkin untuk ditemukan dalam kerja sama yang berkaitan dengan bidang keamanan. Sementara *loss* adalah kondisi di mana negara memperoleh kerugian sebagai akibat dari besarnya keuntungan relatif yang diperoleh pihak lain dalam suatu kerja sama. Setiap kali negara atau aktor HI lainnya terlibat dalam kompetisi, pencarian status dan kemenangan, di situlah keuntungan relatif dipertaruhkan. Realisme percaya bahwa pada dasarnya negara memang selalu mencari keuntungan relatif. Ketika setiap negara yang terlibat dalam kerja sama hanya peduli pada keuntungan relatif, hubungan mereka dapat digambarkan sebagai *zero-sum game* tanpa adanya peluang keberhasilan kerja sama. Ketika sebagian besar negara yang bekerja sama dimotivasi oleh keuntungan relatif, maka hubungan diantara mereka

terbukti setara dengan PD (*Prisoner's Dilema*) terlepas dari struktur permainan keuntungan absolut yang mendasarinya (Rousseau, 1999). *Prisoner's dilemma* merupakan paradoks dalam analisis keputusan dimana dua pihak yang bertindak demi kepentingannya sendiri tidak membuahkan hasil yang optimal.

Ketidakamanan umum dari sistem internasional yang anarki membuat negara tidak hanya mengkhawatirkan tentang seberapa baik situasi mereka sendiri, melainkan seberapa baik situasi mereka dibandingkan dengan negara lain. Selain untuk mencapai kepentingan nasional, adanya ancaman dari eksternal juga dapat menjadi pendorong negara untuk melakukan kerja sama. Pembentukan AUKUS didasari oleh kekhawatiran Pemerintah Amerika Serikat terhadap kebangkitan kekuatan militer Tiongkok, kemudian dengan menggandeng Pemerintah Inggris dan Australia terbentuklah aliansi keamanan di kawasan Indo-Pasifik sebagai respon dari ancaman tersebut.

Menurut Stephen M. Walt aliansi adalah bentuk respon dari suatu negara untuk mengamankan diri dari ancaman. Terdapat tiga faktor yang mendorong negara untuk membentuk sebuah aliansi. Pertama yaitu *balancing*, di mana negara menyeimbangkan kekuatan dengan cara membentuk aliansi untuk menghadapi tantangan yang datang dari negara lain. Kedua, memiliki aliansi dengan mitra negara yang tepat akan menghasilkan keuntungan dalam hal keamanan. Ketiga, adanya kesamaan ideologi yang dianut sehingga mempermudah jalannya kerja sama yang diinginkan (Indra Susila, 2023).

Bagi realisme, anarki merupakan kondisi endemik tidak hanya bagi ketidakamanan sistem internasional melainkan juga untuk pengejaran keuntungan secara aktif dengan cara mengorbankan aktor lain (Vassilev, 2007). Negara yang memperoleh keuntungan secara tidak proporsional dalam hubungan dengan negara lain dapat mencapai keunggulan yang mengancam tujuan atau bahkan keamanan negara mitra kerja mereka. Hal tersebut dapat diartikan bahwa negara tidak akan bekerja sama apabila diketahui negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih dari mereka dan mengancam keamanan mereka.

Negara bisa saja memutuskan untuk menolak ikut, membatalkan kerja sama ataupun memberi batasan pada komitmen apabila dalam kerja sama tersebut terdapat negara lain yang memperoleh keuntungan lebih. Pencarian keuntungan relatif dapat menghambat kerja sama dengan dua cara. Pertama adalah dengan membatasi rentang perjanjian kerja sama yang layak, karena negara tidak akan menerima kesepakatan yang memberikan keuntungan lebih besar secara tidak proporsional kepada pihak lain. Cara kedua merupakan yang paling umum, yaitu keuntungan relatif mempengaruhi kerja sama internasional dengan mengubah insentif negara. Keuntungan relatif memiliki dampak terbesar ketika jumlah negara yang bekerja sama lebih sedikit atau adanya ketidakseimbangan kekuatan di antara negara anggota. Distribusi keuntungan absolut yang asimetris dapat disebut sebagai persyaratan untuk mencapai kesepakatan kerja sama antara negara-negara dengan kekuatan berbeda yang hanya peduli dengan keuntungan relatif. Distribusi keuntungan yang tidak merata, mendukung negara-

negara kecil untuk mengejar negara *superpower* dan juga menurunkan besaran keuntungan relatif yang didapat oleh negara hegemoni tersebut (Snidal, 1991).

Jika salah satu aktor menerima kepuasan atas keuntungan relatif, maka akan ada dua kemungkinan. Pertama adalah bahwa kepuasan tersebut bervariasi dan dipengaruhi oleh lingkungan strategis di mana negara berada. Kemungkinan kedua cukup bertolak belakang dengan yang pertama, di mana kepuasan tersebut tidak bervariasi dan akan tetap sama terlepas dari lingkungan negara berada (Grasa & Costa, 2011). Penelitian ini akan menganalisa upaya Pemerintah Australia untuk mencapai kepentingan keamanan dan pertahanannya melalui pakta AUKUS, dalam hal ini penulis akan melihat dari sisi keuntungan relatif yang diperoleh Pemerintah Australia guna mengoptimalkan tujuan tersebut.

2.3. Kerangka Berpikir

Dalam menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana upaya optimalisasi pakta AUKUS untuk memenuhi kepentingan keamanan Australia, Teori Kepentingan Nasional akan diproyeksikan untuk menentukan kepentingan yang ingin dicapainya. Dalam hal ini kepentingan Australia termasuk dalam *Primary Interest* dan *Permanent Interest*. Serta dalam rangka pemenuhan kepentingan keamanannya, Pemerintah Australia berupaya untuk mengoptimalkan pakta AUKUS sebagai kerja sama keamanan dengan Pemerintah Inggris dan AS. Upaya tersebut dalam rangka untuk mencapai keuntungan relatif (*relative gains*) yang ditempuh dengan melakukan kerja sama dengan negara lain.

Untuk memberikan hasil dari penelitian ini maka perlu dilakukan pendekatan variabel yang akan dianalisis dan dibahas, teknik pengumpulan data, serta pemilihan alat analisis maupun kriteria untuk menguji hipotesis terkait upaya optimalisasi pakta AUKUS dalam mendukung pemenuhan kepentingan keamanan Australia.

3.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis akan menitikberatkan pembahasan penelitian pada upaya yang dilakukan Pemerintah Australia untuk mengoptimalkan keuntungan dari bergabung dengan pakta keamanan AUKUS. Keputusan tersebut akan memengaruhi perubahan atmosfer di kawasan Indo-Pasifik dan juga dalam negeri Australia sendiri. Unit analisis yang menjadi fokus penelitian ini adalah Australia dan AUKUS.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang akan menjelaskan bagaimana upaya Australia untuk mengoptimalkan pakta AUKUS bagi pemenuhan kepentingan keamanannya.

29

3.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dalam hal ini, penulis menyajikan data dan hasil penelitian menggunakan bentuk verbal berupa kata-kata ataupun kalimat yang bersumber dari data primer yang tersedia langsung dari sumber pemerintahan, situs web resmi dan lain sebagainya. Data primer yang digunakan adalah laporan kementerian, *press release* dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh sumber resmi pemerintahan. Data sekunder didapat dan dikaji melalui studi kepustakaan, seperti melalui buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, artikel, laporan media dan data pendukung lainnya yang relevan dan kredibel.

6

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi literatur, dimana data-data yang diperoleh berasal dari buku, jurnal dan juga internet. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mencari dan mengambil data dari berbagai sumber seperti skripsi dan jurnal terdahulu yang telah penulis sebutkan pada tinjauan pustaka yang memiliki keterkaitan.

3.5. Teknik Analisis Data

Proses penelitian dan penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang sudah diterima dan diolah, kemudian disajikan secara deskriptif dengan mengimplementasikan konsep dan teori yang telah dijabarkan. Dengan menerapkan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yang membagi

aktivitas analisis kualitatif menjadi empat bagian ³⁴ berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik maupun metode pengumpulan data, penyisihan data dengan menerapkan konsep dan teori, kemudian menyajikan data secara komprehensif serta melakukan penarikan kesimpulan secara inklusif dan menyeluruh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Australia di Indo-Pasifik

Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan wilayah laut yang luas dan memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Wilayah lautnya yang luas membuat Indo-Pasifik menjadi kawasan penting karena berfungsi sebagai jalur transportasi perdagangan, penempatan angkatan laut dan pengiriman kapal logistik dengan SLOT (*Sea Lines of Trade*) dan SLOCs (*Sea Lines of Communication*).

Istilah Indo-Pasifik dikenalkan untuk pertama kali pada forum QSD (*Quadrilateral Security Dialog*) tahun 2007 oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Selain digunakan untuk menggantikan Asia Pasifik secara penyebutan, Indo-Pasifik juga digunakan untuk memperluas aktor dan wilayah teritorial yang meliputi kawasan tersebut. Peristiwa tersebut sekaligus sebagai penanda perubahan geopolitik di kawasan dengan munculnya para aktor baru yang memiliki kekuatan dalam ekonomi dan militer seperti India dan Tiongkok (Indra Susila, 2023).

Saat ini Indo-Pasifik dikenal sebagai ² **kawasan yang sedang berkembang pesat** dan cukup menjadi **perhatian** internasional dalam **aspek geopolitik**. Kemajuan yang cukup pesat tersebut didukung oleh adanya perpusatan ² **maritim yang terbentang luas**

dari samudera Hindia Barat, Pesisir Samudera Hindia Afrika hingga Pasifi Barat, Asia Timur, Laut Merah dan Teluk Persia (Ali, 2021). Selain perpusatan maritim juga terdapat pengaruh dari aspek strategis yang mengalami perubahan, terutama poros Amerika ke Asia dan meningkatnya kekuatan militer Tiongkok yang diiringi peningkatan minat negara-negara di Samudera Hindia.

Gambar 4.1 Peta Indo-Pasifik



Sumber: *Carnegie Endowment for International Peace, 2022.*

Terlepas dari segala keunggulan-keunggulan tersebut, Indo-Pasifik juga merupakan kawasan paling tereliminasi karena meliputi tujuh dari sepuluh negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, angkatan laut terbesar dan terancang di dunia serta lima negara yang memiliki kekuatan nuklir. Letak Indo-Pasifik yang strategis ini menjadi pisau bermata dua bagi negara-negara yang berada di kawasan. Di satu sisi menjadi manfaat dan meningkatkan daya tawar yang dapat membuat negara

di kawasan tersebut semakin diperhitungkan dalam konteks geopolitik global, namun di sisi lain dapat menimbulkan ancaman yang cukup besar bila terjadi perebutan kekuasaan antara negara-negara dengan kekuatan militer besar.

Negara-negara di Indo-Pasifik cenderung memiliki kedekatan yang intens terhadap negara barat, hal ini karena dalam sejarahnya negara-negara di kawasan Indo-Pasifik berbatasan langsung dengan laut lepas dan banyak di antaranya yang pernah menjadi jajahan kolonialisasi negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda dan Portugal. Faktor kedekatan geografis tersebut diperkuat dengan masih berdirinya beberapa pangkalan militer AS di wilayah Indo-Pasifik seperti Kepulauan Cocos, Darwin, Samoa dan Guam.

² Indo-Pasifik dapat mempengaruhi negara-negara kecil karena adanya negara-negara berkekuatan besar yang berkontribusi. Pergeseran fokus strategi keamanan Pemerintah ² Australia dari Asia Pasifik ke Indo-Pasifik juga menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan daya tariknya. Kawasan ini dapat dikatakan ² sebagai intervensi dan integrasi dari kekuatan maritim India, Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai kekuatan maritim besar yang mempengaruhi negara-negara lain (Ali, 2021). Sejak berakhirnya Perang Dingin, Indo-Pasifik mulai menjadi ² perhatian di antara negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Australia.

³⁷ Dalam Buku Putih Pertahanan Australia 2016 dikatakan bahwa Indo-Pasifik merupakan bagian dari rencana strategi keamanan Pemerintah Australia dan juga ² akan ada banyak negara lain yang terlibat dalam rencana keamanan tersebut (Australian

Government Defence, 2023). Disebutkan juga dalam buku putih tersebut bahwa kemampuan domestik, diplomatik, pertahanan ¹⁹ dan pemberian bantuan luar negeri untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran negara dunia adalah kunci dari Pembangunan fondasi kesuksesan di Indo-Pasifik. Tidak hanya menyebut Indo-Pasifik sebagai bagian dari perencanaan politik luar negerinya, dalam buku putih tersebut juga telah dipetakan ¹⁹ kerangka kerja peluang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang terbuka, inklusif dan makmur serta menghormati hak-hak semua negara (Indo-Pacific Defense Forum, 2019).

Pemerintah Australia melalui *Indo-Pacific Endeavour* (IPE) melaksanakan keterlibatan bilateral dan multilateral, pelatihan dan pembangunan kapasitas. *Indo-Pacific Endeavour* (IPE) pertama kali dijalankan pada 2017 dan bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan sekitar Australia yang menjadi bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi efektif bagi upaya kemanusiaan dan keamanan (Australian Government Defence, 2023). Salah satu agenda keterlibatan Pemerintah Australia di Indo-Pasifik yaitu *Indo-Pacific Endeavour* (IPE) 2023 yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Oktober dan akan berfokus pada kegiatan *fly-in-fly-out*, seperti keterlibatan kepemimpinan senior, pertukaran informasi, tim olahraga, seminar dan inisiatif peningkatan kapasitas.

Pada pelaksanaan *Indo-Pacific Endeavour* (IPE) yang kelima tahun 2022, Pemerintah Australia mengerahkan sekitar 1.800 personel angkatan bersenjata, lima kapal angkatan laut dan 11 helikopter untuk melakukan keterlibatan bilateral dan

multilateral di 14 negara Asia Tenggara dan Samudera Hindia. Agenda tersebut termasuk kunjungan pelabuhan, pelatihan militer, pengembangan kapasitas, kegiatan olahraga dan kegiatan budaya dengan mitra regional di Maladewa, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, Laos, Kamboja, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dan India (Australian Government Defence, 2023).

Negara-negara di Indo-Pasifik yang sering menjadi target kerja sama Pemerintah Australia adalah India, Jepang, Indonesia dan Amerika Serikat. Alasan Pemerintah Australia memilih bekerja sama dengan negara-negara tersebut adalah pertama, karena mereka memiliki kepentingan strategis di Indo-Pasifik dan ingin mengimbangi kekuatan Tiongkok. Kedua, negara-negara tersebut memiliki kedekatan geografis dengan Australia. Ketiga adalah bahwa negara-negara tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar di Kawasan Indo-Pasifik dan memiliki kekuatan untuk membantu Pemerintah Australia mencapai kepentingan di kawasan.

Dalam deklarasi Bersama AUSMIN tahun 2017, Pemerintah Australia dan Amerika Serikat membahas mengenai Indo-Pasifik dan Asia Pasifik. Deklarasi tersebut membahas mengenai keterlibatan kuat dan mendalam kedua negara di Indo-Pasifik, serta fokus pada kerja sama yang lebih erat untuk mempromosikan keamanan, stabilitas, ketahanan dan pembangunan negara-negara di Asia Pasifik. Pemerintah Australia dan Amerika Serikat juga melibatkan Pemerintah Jepang dan India untuk meningkatkan konektivitas di Indo-Pasifik dalam rangka mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Sebelum pembentukan AUKUS pada tahun 2021, Pemerintah Australia telah terlibat dengan berbagai kerja sama internasional di kawasan Indo-Pasifik. Aliansi intelejensi *Five Eyes* dibentuk pada tahun 1946 dengan tujuan menanggulangi perang dingin, aliansi ini terdiri dari Australia, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan AS. Kemudian pakta pertahanan ANZUS dibentuk pada tahun 1951 oleh Pemerintah Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Selain itu, sebuah forum dialog *Quadrilateral Security Dialog* yang dikenal dengan QUAD dibentuk pada tahun 2004 dengan beranggotakan Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia. Forum ini merupakan respon terhadap kebangkitan Tiongkok dengan melakukan dialog kerja sama yang didasarkan pada asas-asas demokrasi.

² Kedekatan geografis Indo-Pasifik dengan Tiongkok menjadi ancaman bagi Pemerintah Australia, apalagi dengan semakin besarnya pengaruh Tiongkok di Asia. Oleh karena itu Pemerintah Australia telah ² melakukan kerja sama diplomatik dalam bidang militer, maritim, ekonomi dan geopolitik dengan negara-negara di Indo-Pasifik. Bagi Pemerintah Australia, ² Indo-Pasifik bukan hanya sekedar kawasan namun di dalamnya terjadi interaksi antar negara berupa kerja sama diplomatik. ² Pemerintah Australia bertekad untuk memberikan pengaruh lebih terhadap negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik agar mereka bergantung kepada Australia bukan sebaliknya.

4.2. Ancaman Tiongkok di Indo-Pasifik

Tiongkok telah menjadi isu utama yang menimbulkan kekhawatiran di Indo-Pasifik dengan perannya sebagai negara yang bersitegang dengan negara adidaya lainnya dan beberapa konflik yang ditimbulkan di kawasan. Untuk memastikan bahwa Tiongkok dapat dikatakan sebagai ancaman di kawasan, penulis menggunakan pengkajian berdasarkan empat elemen. Suatu negara dapat dikatakan sebagai ancaman apabila memenuhi empat kriteria, diantaranya *Aggregate Power*, *Geographical Proximity*, *Offensive Power* dan *Aggressive Intention*.

1. *Aggregate Power*

Hal ini dapat diukur berdasarkan indikator sumber daya tertentu seperti populasi, kekuatan ekonomi, kapabilitas industri militer dan keunggulan teknologi. Tiongkok memiliki populasi lebih banyak dibandingkan dengan Australia dan negara lain di Indo-Pasifik. Data statistik menunjukkan Tiongkok memiliki jumlah populasi sebanyak 1,42 miliar jiwa pada tahun 2023. Selanjutnya kekuatan ekonomi dapat ditentukan dengan melihat perolehan GDP suatu negara. Tiongkok memiliki GDP yang jauh lebih banyak dibanding Australia dan negara lain di Indo-Pasifik yaitu berdasarkan pada data tahun 2023 Tiongkok memiliki GDP sebesar 19.371 miliar dollar sedangkan Australia 17.100 miliar dollar besaran GDP akan berpengaruh pada alokasi dana militer dan teknologi yang merupakan indikator selanjutnya. Pada 2021 Tiongkok menempati peringkat kedua sebagai negara terbesar dalam *military*

expenditure sebesar 293 miliar dollar, sedangkan Australia hanya sebesar 31 miliar dollar. Indikator terakhir adalah keunggulan teknologi yang dapat diukur dengan *Research and Development* (RnD) suatu negara. Berdasarkan data 2021, Tiongkok mengeluarkan anggaran sebesar 436 miliar dollar untuk RnD dan itu merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan negara lain di Indo-Pasifik. Besaran pengeluaran RnD tersebut tentunya sangat berpengaruh pada kemampuan pengembangan teknologi suatu negara yang dalam hal ini membuat Tiongkok lebih unggul.

2. *Geographic Proximity*

Elemen ini merupakan indikator ancaman yang menekankan pada kedekatan geografis. Semakin dekat suatu negara dengan sumber ancaman maka akan semakin besar pula potensi ancaman yang didapat. Meskipun Australia bukanlah negara yang paling dekat dengan Tiongkok dibanding dengan negara-negara lain di kawasan khususnya yang berada di Asia Tenggara, namun Pemerintah Australia memiliki kekhawatiran yang besar. Kekhawatiran tersebut didasari oleh adanya kerenggangan hubungan Australia dan Tiongkok serta dari kepemilikan senjata nuklir oleh Tiongkok yang memiliki jangkauan sejauh 15.000 km, sementara Australia dan Tiongkok secara geografis berjarak 7.000 km yang artinya sangat memungkinkan bagi Tiongkok untuk melakukan serangan kepada Australia. *Australia Defence Magazine* (ADM) juga menyatakan bahwa bagi Tiongkok tidaklah sulit untuk menyerang daratan

Australia karena letak populasi Australia sebanyak 90% berada di sepanjang wilayah pesisir timur. Dalam hal ini Pemerintah Tiongkok telah memenuhi elemen *geographic proximity* untuk menjadi ancaman bagi Australia dan negara lain di Indo-Pasifik.

3. *Offensive Power*

Kekuatan yang ofensif adalah sumber daya strategis yang dimiliki oleh suatu negara dan dipergunakan untuk mengancam kedaulatan atau territorial negara lain dengan kemampuan yang dapat merusak ataupun menghancurkan, dalam hal ini adalah sumber daya militer. Dua hal yang menjadi parameter sumber daya militer suatu negara yaitu manuver *manpower* dan alustista. Tiongkok memiliki *manpower* yang jumlahnya sangat besar yaitu 3,1 Juta personil yang terdiri dari personil aktif, personal cadangan dan paramiliter. Kemudian alustista dibagi menjadi tiga bagian yaitu darat, laut dan udara. Dari segi darat Tiongkok memiliki persenjataan dengan total 4,9 ribu aset, segi laut sebanyak 777 aset dan dari segi udara memiliki 3,2 ribu aset. Dari ketiga bidang alustista tersebut Tiongkok menempati kepemilikan aset paling tinggi diantara negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Keunggulan Tiongkok dari segi sumber daya militer ditambah juga dengan kepemilikan senjata strategis seperti nuklir dan teknologi misil sebagai penguatan pertahanan militernya. Tiongkok tercatat memiliki senjata nuklir sebanyak 350 buah dan bahkan akan terus bertambah pada tahun 2027 menjadi sebanyak 700 buah. Dengan ini Tiongkok memenuhi

kriteria untuk dianggap sebagai ancaman dikawasan berdasarkan *offensive power*.

4. *Aggressive Intention*

¹ Perilaku suatu negara yang cenderung bertindak agresif atau menyerang keamanan negara lain disebut juga dengan *Aggressive intention*. Dalam hal ini terdapat tiga peristiwa yang menjadi bukti Tindakan agresif Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Peristiwa pertama yaitu kenaikan pembiayaan militer Tiongkok pada 2019 hingga 2021. Kenaikan pengeluaran militer ini sebenarnya bukanlah hal baru yang dialami Tiongkok, melainkan sudah ¹ berlangsung secara berturut-turut selama 27 tahun lamanya. Peristiwa yang kedua yaitu Tindakan agresif Tiongkok di LTS yang pertama kali dilaporkan oleh Filipina pada tahun 2020, laporan tersebut terkait adanya ¹ sebuah kapal Angkatan Laut Tiongkok yang mengarahkan radar pengendali tembakan ke kapal Angkatan Laut Filipina di lepas pantai Commodore Reef di Kepulauan Spartly. Selain itu Tiongkok membangun dua tempat penelitian baru di Fierry Cross Reef dan Subi Reef yang juga terletak di Kepulauan Spartly yang bahkan ¹ dilengkapi dengan silo pertahanan dan landasan pacu militer. Ketiga peristiwa tersebut telah cukup untuk membuktikan bahwa Tiongkok memenuhi aspek *aggressive intention* untuk menjadi ancaman di kawasan. Tambah data dari penelitian SIPRI.

¹ Beberapa fenomena penting yang menjadi perhatian di Indo-Pasifik dilakukan oleh Tiongkok sebagai pemilik kekuatan militer terbesar di kawasan. Fenomena

pertama yaitu gejolak di Laut Cina Selatan yang secara sengaja diperlihatkan oleh Tiongkok sebagai bentuk pembelaan atas klaim “*Nine Dash Line*” atau Sembilan garis putus-putus. Tiongkok menjadikan *Nine Dash Line* ini sebagai landasan territorial atas dasar historis, hal ini kemudian menjadi masalah karena bertentangan dengan UNCLOS 1982. Klaim Tiongkok atas wilayah tersebut berakibat pada timbulnya pertentangan dan sengketa dengan negara lain seperti Filipina. Respon yang diberikan Tiongkok atas hal tersebut berupa Tindakan agresif di Laut Cina Selatan seperti melakukan patrol di perairan sekitar Kepulauan Spratly, mengadakan pelatihan militer secara massif, serta membangun beberapa fasilitas militer di wilayah tersebut.

Tindakan agresif kedua yang dilakukan oleh Tiongkok dapat dilihat dari perkembangan militernya. Tiongkok tercatat memiliki rudal *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) dengan jangkauan radius sejauh 15.000 km yang bisa menjangkau hingga ke wilayah teritorial Australia. Agresivitas lain dari Tiongkok yaitu rencana pembangunan pangkalan militer di luar teritorial negaranya. Departemen Pertahanan Amerika Serikat terus melakukan penyelidikan atas dugaan Tiongkok melakukan serangkaian pembangunan pangkalan militer yang tersebar ke seluruh dunia.

Di bawah pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2013, Tiongkok mengeluarkan kebijakan besar yang dikenal dengan *One Belt One Road* (OBOR). Secara Intens Tiongkok juga melakukan kerja sama ekonomi regional diantaranya FOCAC (*Forum China-Africa Cooperation*) di Afrika Timur, *Framework Agreement on ASEAN-China*

Economic Cooperation di Asia Tenggara, serta menjadi pengamat dalam MSG (*Melanesian Spearhead Group*) di Pasifik Selatan .

Kehadiran Tiongkok dan pengaruhnya yang semakin besar di kawasan Indo-Pasifik telah berhasil menimbulkan kekhawatiran bagi AS dan sekutunya. Untuk merespon hal tersebut AS melakukan tindakan untuk menanggulangi pengaruh Tiongkok dengan mengeluarkan kebijakan yang difokuskan untuk menstabilkan kawasan Indo-Pasifik dari ancaman hegemoni Tiongkok. AS melakukan pemindahan pasukan militer di Timur Tengah sebanyak 60% dibawah komando USPACOM (*The United States Pacific Command*) ke Indo-Pasifik sebagai bentuk upaya awalnya.

Saat ini Tiongkok dikenal sebagai negara di Indo-Pasifik yang bertransformasi menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,49% selama satu dekade. Seiring dengan meluasnya kepentingan ekonomi dan keamanan, upaya untuk memperluas jejak militernya di luar negeri dilakukan untuk melindungi kepentingan tersebut. Secara khusus Tiongkok berupaya membangun logistik global ²³ dan infrastruktur pangkalan untuk memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak yang lebih jauh, yang mana tindakan tersebut menyalahi pengaturan komersial di pelabuhan negara tuan rumah untuk mendukung fungsi militer. Hingga saat ini militerisasi Tiongkok masih menjadi kekhawatiran paling besar di Laut Cina Selatan.

4.3. *Australia – United Kingdom – United State*

4.3.1. Pakta Keamanan AUKUS

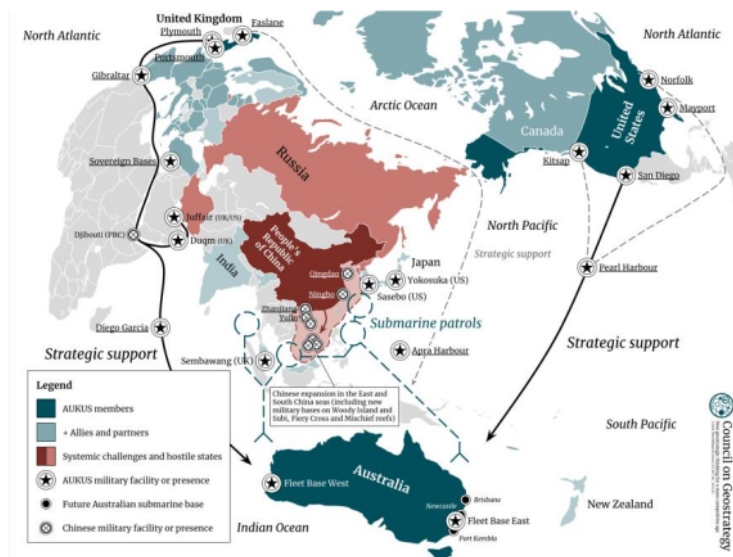
Pemerintah Australia bersama Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris mengumumkan pembentukan kemitraan keamanan trilateral tingkatan yang disebut AUKUS pada 15 September 2021, untuk mempromosikan kerja sama keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan mewujudkan integrasi tingkat tinggi di ketiga negara dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan rantai pasokan. Inisiatif pertama AUKUS adalah keputusan trilateral bersejarah untuk mendukung Pemerintah Australia memperoleh kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional.

AUKUS akan menghadirkan kapal selam yang dikembangkan secara trilateral berdasarkan desain generasi mendatang dari Inggris yang menggabungkan teknologi dari ketiga negara, termasuk teknologi kapal selam AS yang mutakhir. Pemerintah Australia dan Inggris akan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir yang disebut “SSN-AUKUS” sebagai kapal selam masa depan mereka (U.S. Embassy in Canberra, 2023).

Pembentukan AUKUS merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan dan menguatkan kembali hegemoni barat sekaligus menjadi puncak strategi untuk menangkal ancaman agresivitas Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik yang di pimpin oleh AS. Bentuk inisiatif awal dari AUKUS ini kemudian menarik perhatian berbagai

negara dalam lingkup internasional. Pemerintah Tiongkok mengancam keras AUKUS karena dianggap mengganggu kestabilan kawasan dan akan melanggar perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Negara-negara di kawasan juga memiliki kekhawatiran bahwa aliansi tersebut akan dapat memicu perlombaan senjata dan meningkatkan risiko konflik.

Gambar 4.2 Peta Geopolitik AUKUS



Sumber: *Council of Geostrategy, 2022.*

Sejak Perang Dunia II berakhir, pandangan masyarakat internasional tentang keamanan telah berubah menjadi perdamaian yang dapat diwujudkan dengan cara menghindari konflik. Oleh karena itu kehadiran pakta AUKUS di kawasan Indo-Pasifik dianggap oleh beberapa pihak sebagai fenomena yang akan mengancam perdamaian.

Kerja sama trilateral ini merupakan sebuah peristiwa besar karena ketiga negara secara jelas melakukan peningkatan kekuatan militer yang melibatkan tenaga nuklir.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin ketiga negara AUKUS pada September 2021, aliansi tersebut tidak hanya akan berfokus secara khusus pada Tiongkok. Agar dapat mengatasi tantangan keamanan kontemporer dengan lebih baik, AUKUS menyatakan bahwa rangkaian agenda dari kerja sama keamanan tersebut akan berupa sesi pertemuan-pertemuan selama beberapa tahun berikutnya untuk mengkoordinasikan permasalahan siber, teknologi dan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik secara efektif.

AUKUS akan menjadikan Australia sebagai negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir Amerika Serikat. Pemerintah AS akan mendukung pengembangan kapasitas Australia untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir dalam negeri di Adelaide. Sebagai bagian dari program kerja AUKUS, kapal selam bertenaga nuklir akan memungkinkan Angkatan Laut Australia untuk memantau dan melindungi kepentingannya di Laut Cina Selatan di mana Pemerintah Tiongkok melakukan agenda dominasi militernya.

Kapal selam bertenaga diesel tradisional digerakkan menggunakan baterai yang hanya dapat digunakan selama beberapa hari. Untuk melindungi pendekatan maritim, jalur komunikasi dan untuk mendukung berbagai dampak strategis yang dapat meningkatkan keamanan nasional, suatu negara membutuhkan kemampuan teknologi kapal selam yang unggul. Strategi pertahanan akan lebih unggul di atas kertas dan

dalam praktiknya apabila suatu negara memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Jika dibandingkan dengan kapal selam bertenaga diesel, kapal selam bertenaga nuklir memiliki kualitas ketahanan, kecepatan, kemampuan manuver, kelangsungan hidup dan daya tahan yang hampir tak terbatas. Kapal selam ini memiliki risiko yang lebih rendah untuk ditemukan saat beroperasi di area yang kontroversial dan dapat menggagalkan upaya yang dapat merugikan kepentingan negara.

Dibalik keuntungan yang akan didapat oleh Pemerintah Australia terkait kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir, tidak dapat dipungkiri bahwa tenaga propulsi nuklir merupakan senjata yang berbahaya. Australia akan terus menjadi negara bebas tenaga nuklir yang akan menjunjung tinggi komitmennya terhadap Badan Energi Atom Internasional, Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan kesepakatan terkait lainnya selama pelaksanaan agenda pakta AUKUS berlangsung dan seterusnya. Dengan begitu, pakta keamanan trilateral AUKUS dapat dipandang sebagai penyeimbang atas kekuatan militer Tiongkok yang semakin berkembang dan menjadi kekhawatiran banyak pihak di Kawasan Indo-Pasifik.

Pada 13 Maret 2023 Perdana Menteri Anthony Albanese dari Australia, Perdana Menteri Rishi Sunak dari Inggris, dan Presiden Joseph Biden dari Amerika Serikat mengumumkan pengaturan agar Australia memperoleh senjata konvensional dan bertenaga nuklir, kemampuan kapal selam (SSN) melalui peningkatan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat. Dalam pengumuman yang dilakukan

dihadapan pers tersebut pimpinan ketiga negara AUKUS menyampaikan mengenai perencanaan program kapal selam Australia, di antaranya adalah:

- 1) Terhitung sejak tahun awal ⁵ tahun 2023, personel militer dan sipil Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut AS, Angkatan Laut Kerajaan Inggris, dan pangkalan industri kapal selam AS dan Inggris sebagai upaya mempercepat pelatihan personel Australia. Pada tahun 2023 Pemerintah AS juga akan meningkatkan kunjungan pelabuhan ke Australia. Sementara Pemerintah ⁵ Inggris akan meningkatkan kunjungan ke Australia pada tahun 2026.
- 2) Pada awal tahun 2027, Pemerintah AS dan Inggris berencana untuk memulai rotasi SSN ke Australia untuk mempercepat pengembangan personel Angkatan Laut Australia, tenaga kerja, infrastruktur dan sistem peraturan yang diperlukan untuk membangun kemampuan SSN yang berdaulat.
- 3) Pada awal tahun 2030an sambil menunggu persetujuan Kongres, Pemerintah AS akan mengirimkan SSN-AUKUS pertamanya ke *Royal Navy*.
- 4) SSN-AUKUS pertama yang dibuat untuk Angkatan Laut Kerajaan Australia akan dikirimkan ⁵ pada awal tahun 2040-an.

Perencanaan tersebut dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kemampuan teknis, industri dan sumber daya manusia Australia yang diperlukan untuk

memproduksi, memelihara, mengoperasikan dan mengelola armada kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional. Pemerintah Australia berkomitmen untuk patuh terhadap pengelolaan teknologi propulsi nuklir angkatan laut secara bertanggung jawab.

Dalam pengumuman peresmian AUKUS⁷ pada September 2021, ketiga negara berkomitmen untuk menetapkan standar non-proliferasi nuklir tertinggi. Perencanaan program SSN-AUKUS yang diumumkan pada maret 2023 sudah membuktikan bahwa AUKUS akan mampu menepati janjinya dalam memenuhi komitmen tersebut dan mencerminkan kepemimpinan ketiga negara anggota yang telah lama ada⁷ dan menghormati rezim non-proliferasi nuklir global. AUKUS akan terus berkonsultasi dengan Badan Energi Atom Internasional untuk mengembangkan pendekatan non-proliferasi yang menjadi preseden terkuat untuk akuisisi kemampuan global kapal selam bertenaga nuklir.

Penerapan AUKUS juga memerlukan pertukaran informasi dan kerja sama teknologi yang kuat dan baru. Ketiga negara berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi trilateral yang akan memperkuat kemampuan bersama, meningkatkan pertukaran informasi dan teknologi serta memperkuat strategi keamanan masing-masing negara. Aliansi AUKUS memulai periode konsultasi selama 18 bulan sejak September 2021 untuk mengidentifikasi jalur yang optimal bagi Australia untuk memperoleh teknologi propulsi nuklir, sekaligus menetapkan standar non-proliferasi nuklir tertinggi. Perencanaan yang telah dibuat terkait pengadaan SSN-AUKUS

dipercaya akan meningkatkan basis industri kapal selam dan kemampuan bawah laut ketiga negara anggota, meningkatkan pencegahan dan tentunya mendorong stabilitas di Indo-Pasifik.

Pada tahun 2022, Pemerintah Amerika Serikat menerima personel Angkatan Laut Australia untuk mengikuti program pelatihan propulsi nuklir yang pertama, personel tambahan dijadwalkan untuk bergabung dalam kelompok berikutnya. Kongres Amerika Serikat, sebagai bagian dari Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional Tahun Anggaran 2023 mengesahkan ketentuan bipartisan yang menetapkan kemampuan bagi perwira kapal selam Kerajaan Australia untuk berlatih di Komando Pelatihan Tenaga Nuklir Angkatan Laut dan pada akhirnya bertugas di kapal selam operasional AS. Pemerintah Inggris juga menyambut personel Australia untuk mengikuti pelatihan khusus teknologi nuklir Angkatan Laut Kerajaan.

Pemerintah Australia akan mengirim ratusan pekerja ke galangan kapal AS dan Inggris, serta ilmuwan dan insinyur ke fasilitas teknis AS dan Inggris untuk pelatihan keterampilan khusus yang mana akan mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk membangun dan memelihara kapal selam bertenaga nuklir. Selain meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kedatangan SSN, Pemerintah Australia akan membangun kemampuan pemeliharaan dan perbaikan yang juga dapat digunakan oleh kapal selam AS dan Inggris sehingga meningkatkan kapasitas AUKUS untuk meningkatkan kekuatannya di masa damai dan memenuhi kebutuhan operasional di saat kritis. AUKUS akan melakukan pendekatan bertahap untuk membangun

pengelolaan dan mempertahankan kemampuan bawah laut Australia. Pendekatan bertahap ini mencakup beberapa elemen diantaranya personil tertanam dan kunjungan pelabuhan, gaya rotasi kapal selam, penjualan kapal selam kelas Virginia AS, dan SSN-AUKUS.

Personel tertanam yang dimulai pada tahun 2023 ini dimaksudkan untuk ³mempercepat pelatihan dan pengembangan personel Australia, sekaligus memastikan kemampuan ketiga negara dalam bekerja sama serta agar masyarakat Australia dapat merasa memiliki tanggung jawab terkait dengan program-program tersebut. Dalam hal ini ³personel militer dan sipil Australia akan bergabung dengan Angkatan Laut AS, Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan tergantung pada pengaturan yang diperlukan di pangkalan industri kapal selam AS dan Inggris. Pemerintah ⁵AS berencana untuk meningkatkan kunjungan pelabuhan SSN ke Australia dibersamai dengan pelaut Australia yang akan bergabung dengan awak kapal AS untuk pelatihan dan pengembangan, disusul oleh Inggris pada tahun 2026.

Kemudian pada awal ¹³tahun 2027, Pemerintah Inggris dan AS berencana untuk membangun kehadiran bergilir satu kapal selam kelas Astute Inggris hingga empat kapal selam kelas Virginia AS di HMAS *Stirling* dekat Perth, Australia Barat. Inisiatif ini disebut dengan “Rotasi Kapal Selam *Force-West*” dan akan sepenuhnya mematuhi ³posisi lama Australia yang tidak memiliki pangkalan asing di wilayahnya. Pemerintah AS dan Inggris diharuskan bahu-membahu seiring dengan ³Australia membangun kemampuan operasional dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan

mengoperasikan armada kapal selam bertenaga nuklirnya sendiri. Pemerintah Australia meluncurkan upaya nasional yang cukup ambisius untuk meningkatkan tenaga kerja pertahanan dan industri guna mendukung rencana tersebut (U.S. Embassy in Canberra, 2023).

Tahapan selanjutnya akan dimulai pada awal tahun 2030an sambil menunggu persetujuan dari Kongres AS, Pemerintah Amerika Serikat berencana untuk menjual tiga kapal selam kelas Virginia kepada Pemerintah Australia dengan potensi untuk menjual hingga dua lagi apabila diperlukan. Langkah ini penting untuk terus mendukung pengembangan kemampuan Australia dalam mengoperasikan armada SSN dan untuk memberikan Australia kemampuan berdaulat sedini mungkin. Hal ini juga untuk memastikan bahwa Pemerintah Australia tetap akan mempertahankan kemampuan bawah lautnya hingga SSN-AUKUS siap, mengingat rencana pensiunnya armada kapal selam Australia saat ini.

Kombinasi desain kapal selam Inggris dan teknologi tingkat tinggi AS dimaksudkan untuk menghasilkan kapal selam terbaik di kelasnya yang memenuhi kebutuhan pertahanan jangka Panjang Australia sekaligus memperkuat kerja sama industri keamanan dan pertahanan trilateral. SSN-AUKUS akan menjadi kapal selam masa depan bagi Australia dan Inggris. Pemerintah Inggris akan mengirimkan SSN-AUKUS pertamanya ke Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada akhir tahun 2030an dan Australia pada awal tahun 2040an.

Penerapan pendekatan-pendekatan dalam program kerja AUKUS akan konsisten dengan kewajiban internasional masing-masing mitra trilateral dan tetap mematuhi hukum dalam negeri serta didukung oleh pengaturan hukum dan kemungkinan untuk berbagi informasi, peralatan dan teknologi yang sensitif di masa depan. Selama sekitar 60 tahun, Pemerintah Inggris dan AS telah mengoperasikan lebih dari 500 reaktor nuklir angkatan laut yang secara kolektif mampu menempuh jarak lebih dari 150 juta mil atau setara dengan 300 perjalanan ke bulan dan kembali, tanpa insiden atau dampak buruk terhadap kesehatan manusia maupun kualitas lingkungan hidup. Pemerintah Australia berkomitmen untuk menjunjung standar yang sama untuk mengelola teknologi propulsi nuklir angkatan laut dengan aman.

¹¹ AUKUS menunjukkan komitmen bersama ketiga negara terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka serta sistem internasional yang menghormati supremasi hukum, kedaulatan, hak asasi manusia dan penyelesaian sengketa secara damai. Negara anggota AUKUS yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir dan bersenjata konvensional berkemampuan tinggi akan memberikan jaminan ¹⁷ kemampuan bawah laut yang berkontribusi terhadap stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di Indo-Pasifik serta di seluruh dunia.

Program AUKUS dalam pengadaan kapal selam bertenaga nuklir telah mencapai beberapa langkah perkembangan seperti pertukaran informasi terkait propulsi nuklir angkatan laut secara trilateral yang disepakati pada 8 Februari 2022 melalui ENNPIA *“The Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information*

Agreement". Selain memiliki *Senior Official Groups* yang berisikan pejabat senior dari ketiga negara anggota dan *Joint Steering Groups* yang merupakan hasil gabungan dari ketiga negara, AUKUS juga membentuk *Working Groups* yang terdiri dari tujuh belas kelompok kerja.

Setelah program pengadaan SSN-AUKUS yang direncanakan akan dapat dimiliki Pemerintah Australia pada tahun 2040, AUKUS juga akan menjalankan program pengembangan kemampuan tingkat tinggi bawah laut melalui AURAS (*The AUKUS Undersea Robotics Autonomous System*). AUKUS akan menciptakan kendaraan otonom bawah laut yang direncanakan akan menjadi kekuatan signifikan bagi Angkatan Laut Australia. Selain itu juga terdapat program pengembangan teknologi quantum melalui AQuA (*AUKUS Quantum Agreement*) yang akan berfokus pada kemampuan penentuan navigasi dan posisi.

Program lain yang akan dikerjakan oleh AUKUS kedepan adalah pengembangan *Artificial Intelligence and Autonomy* yang dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing ketiga negara di masa depan, khususnya dalam kecepatan dan ketepatan proses pengambilan keputusan serta mempertahankan keunggulan perlindungan negara dari ancaman. Dalam rangka meningkatkan sistem pertahanan, AUKUS juga akan memperkuat kemampuan siber tingkat tinggi dengan perlindungan informasi, komunikasi, dan sistem operasi.

Peningkatan kapabilitas militer juga akan dilengkapi dengan pengembangan kemampuan hipersonik dan kontra-hipersonik tingkat tinggi. AUKUS mempersiapkan

sistem pertahanan militer yang memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi perang elektronik dengan cara bekerja sama dan berbagi informasi mengenai Teknik dan teknologi yang berkaitan dengan spektrum elektromagnetik.

Meskipun saat ini program yang dijalankan AUKUS difokuskan pada peningkatan kemampuan armada laut bertenaga nuklir dan peningkatan kapabilitas keamanan pelengkap lainnya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pakta keamanan AUKUS nantinya akan berjalan secara dinamis menyesuaikan dengan perkembangan situasi politik dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

4.3.2. Kepentingan Amerika Serikat dalam Pakta AUKUS

Pemerintah Amerika Serikat telah memiliki sejarah kedekatan dengan Pemerintah Inggris dan Australia sejak lama dan semakin erat pada masa pasca Perang Dingin. kedekatan dalam berbagai peristiwa perang selama abad ke-20 membuat hubungan ketiganya dapat dikategorikan sebagai mitra yang penting bagi satu sama lain. Agenda kerja sama pasca perang dingin dalam hubungan AS-Inggris-Australia bersifat fleksibel dan cenderung selalu mengalami kemajuan, masing-masing negara masih dapat melakukan kerja sama secara leluasa dengan negara lain selama tidak merusak hubungan antara ketiganya.

Pemerintah Amerika Serikat memberi keistimewaan kepada Pemerintah Inggris dan Australia dalam perdagangan senjata melalui *UK-US Defence Trade Cooperation Treaty* dan *Australia-US Defence Trade Cooperation Treaty* sebagai

sekutu besarnya (Indra Susila, 2023). Pemerintah AS dan Inggris kemudian menempati posisi strategis dalam berbagai bidang keamanan dunia seperti menjadi pendiri NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan menjadi anggota permanen dalam *United Nation Security Council*. Sementara hubungan bilateral antara Pemerintah AS dan Australia juga terus berlangsung baik melalui konsultasi antar pemerintah yang dikenal dengan AUSMIN (*Australia-United States Ministerial Consultations*) dan agenda ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

Kerja sama antara ketiga negara tersebut terus berkembang terutama pada periode kontemporer setelah bangkitnya kekuatan besar baru di dunia seperti Tiongkok, Korea Utara dan Rusia. Pemerintah Amerika Serikat mulai merasa kebangkitan kekuatan baru tersebut menjadi ancaman bagi pengaruh dan reputasinya sebagai negara hegemoni terbesar di dunia. Sikap yang diambil AS dalam merespon hal tersebut yaitu dengan melakukan perubahan kebijakan keamanannya dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik. Langkah pertama yang dilakukan oleh AS yaitu membentuk QUAD (*Quadrilateral Security Dialog*) bersama Australia, Jepang dan India. Selanjutnya AS terus memusatkan perhatian dan fokus kebijakan keamanannya pada kawasan Indo-Pasifik.

Pada Maret 2021 pemerintah AS merilis INSSG (*Interim National Security Strategic Guidance*) yang merupakan batu loncatan menuju strategi keamanan nasional yang lengkap. Dalam dokumen tersebut terdapat beberapa asumsi yang berkaitan dengan strategi keamanan AS, di antaranya adalah AS harus menjadi pusat

penyelesaian sebagian besar permasalahan global, melindungi demokrasi di luar negeri memerlukan kesatuan global diantara negara-negara demokrasi, perbedaan antara kebijakan dalam dan luar negeri dengan cepat menjadi kurang relevan, dan bahwa AS harus berusaha untuk lebih unggul dari Tiongkok (Biden, 2021).

Perilisan INSSG menjadi peralihan strategi keamanan nasional AS dari “*America First*” menjadi Amerika Serikat yang sepenuhnya terlibat dengan dunia. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan Biden akan berupaya untuk merebut kembali peran AS sebagai pemimpin dunia dan akan jauh lebih bersahabat terhadap sekutu dan mitranya. INSSG menyebutkan tantangan-tantangan yang dihadapi AS termasuk krisis COVID -19 dan kebangkitan Tiongkok sekaligus menjelaskan bahwa Indo-Pasifik telah menjadi bagian dari kepentingan nasional yang sifatnya vital bagi keamanan dan pertahanan AS.

Pemerintahan Joe Biden telah memusatkan perhatian besar pada Kawasan Indo-Pasifik dan menyatakan bahwa penting bagi AS untuk memajukan berbagai kepentingan ekonomi, politik dan keamanan di Kawasan tersebut. Komitmen Pemerintah AS terhadap sekutu dan mitra di Indo-Pasifik serta semakin meningkatnya persaingan geopolitik dengan Tiongkok telah menghidupkan beberapa inisiatif diplomatik Pemerintah AS yang baru.

Kunci kesuksesan Pemerintah AS di Indo-Pasifik dalam melawan Tiongkok adalah bahwa Pemerintah AS dapat terlibat secara aktif di dalam negeri, berinvestasi dengan tepat dan bersaing secara internasional. Keterlibatan Pemerintah AS yang

semakin dalam dengan sekutu dan mitranya di Indo-Pasifik dimaksudkan untuk mengirimkan pesan bahwa Amerika Serikat hadir dan akan mendukung keamanan dan kestabilan kawasan dengan sistem operasi yang sangat baik dan dalam jangka waktu yang panjang.

Bersamaan dengan Pembangunan militernya, Pemerintah Tiongkok telah berupaya untuk membangun dan menggabungkan kemitraan ekonomi secara internasional. Pemerintah Tiongkok mengajukan keanggotaan dalam kemitraan perdagangan Trans-Pasifik Komprehensif dan Progresif (CPTPP). Bagi Pemerintah AS CPTPP merupakan cara untuk menetapkan aturan jalannya perdagangan, sehingga tawaran Pemerintah Tiongkok untuk bergabung dengan CPTPP merupakan hal yang perlu ditanggapi dengan serius. Pemerintah AS terancam kehilangan komponen ekonomi dalam strategi dalam menghadapi tantangan Tiongkok. Pemerintahan Biden saat ini sedang memulai upaya untuk melibatkan sekutunya di Indo-Pasifik yang sependapat tentang prospek pembangunan kerangka kerja ekonomi seputar isu-isu utama di abad ke-21.

Menurut Koordinator Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik Kurt Campbell, AS harus memastikan bahwa fokusnya pada Indo-Pasifik tidak akan mengorbankan kepentingannya di belahan dunia lain dimana Tiongkok juga menjadi tantangan. AS yakin bahwa perang agresif Rusia terhadap Ukraina semakin menggaris bawahi perlunya berinvestasi besar-besaran pada basis industri pertahanan agar sekutunya juga melakukan hal yang sama.

Oleh karena itu, AS membangun benteng persaingan yang penuh strategi dalam hal ini adalah investasi secara serius dalam bidang teknologi, *AI*, komputasi kuantum, 5G dan ilmu pengetahuan. Keuntungan AS di Kawasan Indo-Pasifik saat ini sedang menghadapi tantangan, sehingga untuk memaksimalkan keuntungan memang diperlukan adanya meningkatkan permainan.

Dalam pakta AUKUS, Pemerintah Amerika Serikat menginisiasi langkah awal untuk memfasilitasi Angkatan Laut Australia dan Inggris untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir yang dalam proses pembuatan dan pengoperasiannya akan menggabungkan kemampuan teknologi ketiga negara. Pemerintah AS menginvestasikan tambahan \$2,4 miliar pada tahun fiskal 2023-2027 dalam basis industri kapal selam untuk meningkatkan kapasitas konstruksi guna memenuhi kebutuhan nasional, angka ini melebihi investasi tahunan Pemerintah AS untuk anjungan bawah laut.

Pemerintah AS juga menambahkan \$2,2 miliar ke anggaran pemeliharaan kapal selamnya selama dua tahun fiskal untuk meningkatkan pemeliharaan SSN kelas Virginia. Pemerintah AS masih terus mengkaji investasi tambahan apa saja yang diperlukan untuk mempercepat proses produksi dan menunjang pemeliharaan kapal selam guna mendukung kepentingan AS dan AUKUS. Investasi ini akan mendukung ribuan pekerjaan dengan keterampilan tinggi di AS. Pemerintah Australia telah berkomitmen terhadap investasi finansial yang proporsional di basis industri kapal selam AS untuk mempercepat pengiriman kapal selam kelas Virginia.

4.3.3. Kepentingan Inggris dalam Pakta AUKUS

Inggris merupakan negara Eropa yang memiliki relasi paling banyak di Indo-Pasifik sejak waktu yang lama. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang saat ini menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan berpengaruh dan diperhatikan dunia, maka Pemerintah Inggris juga telah menjadikan Indo-Pasifik sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Langkah tersebut merupakan strategi Pemerintah Inggris untuk kembali memperluas pengaruhnya secara global pasca *Brexit* dan untuk melaksanakan kebijakan “*Global Britain*”.

Pada tahun 2022 Pemerintah Inggris baru mengajukan untuk bergabung dalam CPTPP (*Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership*) dengan tujuan untuk memasukkan sektor produk dan jasa ke pasar Indo-Pasifik. Selain itu Pemerintah Inggris juga telah menyepakati *ASEAN-United Kingdom Dialogue Partnership* tahun 2022-2026, serta memulai percakapan tentang kebijakan FTA (*Free Trade Agreement*) bersama Pemerintah India pada tahun 2022.

Kompleksitas Indo-Pasifik dalam aspek geografis yaitu kawasan ini merupakan jalur perdagangan dan komunikasi utama bagi sebagian besar armada laut di dunia. Melalui jalur maritimnya Indo-Pasifik menjadi penghubung seluruh dunia dari Asia, Australia, Afrika, Oceania, Amerika dan Eropa. Selain aspek geografis, kompleksitas kawasan Indo-Pasifik juga dapat dilihat dari lahirnya negara-negara dengan kekuatan

militer yang cukup kuat seperti Tiongkok dan Korea Utara. Aspek-aspek tersebut kemudian menjadikan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang dimiliterisasi.

Lahirnya kekuatan-kekuatan militer baru diiringi juga dengan banyaknya konflik kepentingan di kawasan tersebut. Salah satu konflik terbesar di Indo-Pasifik yang mencuri perhatian dunia adalah Laut Cina Selatan. Selain itu juga terdapat beberapa konflik bilateral seperti konflik Korea Selatan-Korea Utara, Tiongkok-Taiwan dan India-Pakistan yang berlangsung cukup lama. Tentunya konflik-konflik di kawasan tersebut tidak terlepas dari campur tangan dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun Pemerintah Inggris menjalin hubungan ekonomi yang cukup dekat dengan Tiongkok pada pemerintahan Perdana Menteri Cameron, namun sejak tahun 2016 Pemerintah Inggris cenderung memandang Tiongkok sebagai ancaman.

Dari banyaknya konflik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik, yang paling menjadi kekhawatiran Pemerintah Inggris adalah kebangkitan kekuatan militer Tiongkok yang terus dilakukan untuk melindungi wilayah perdagangannya. Kekuatan militernya semakin diperluas secara cepat hingga salah satunya telah berhasil mendekati kawasan negara Australia, yaitu ketika tercapainya pakta keamanan Tiongkok dan Kepulauan Solomon. Oleh karena itu Pemerintah Inggris bersama dengan dua mitra besarnya yaitu AS dan Australia membuat sebuah pakta keamanan AUKUS yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan militer tiga negara tersebut serta melindungi kepentingan ketiganya di kawasan Indo-Pasifik.

Pakta AUKUS memiliki berbagai program pembangunan kekuatan militer didalamnya, diawali dengan program pengadaan ¹⁶ kapal selam bertenaga nuklir yang akan dioperasikan oleh Pemerintah Inggris dan Australia. Dalam program kapal selam yang akan disebut dengan SSN-AUKUS tersebut, Inggris memiliki peran yang sangat penting yakni sebagai perancang desain dan salah satu pembangun kapal selam masa depan untuk Angkatan Laut Inggris dan Australia

Pemerintah Inggris bermaksud untuk melanjutkan investasi yang baru-baru ini dilakukan dalam pengiriman kapal selamnya, seperti £2,0 miliar pada *BAE System, Barrow and Rolls Royce*, dan *Derby* yang diumumkan pada tahun 2022. Hal ini akan memberi dampak baik dalam peningkatan kesejahteraan Inggris, seperti menciptakan ribuan lapangan kerja di Inggris termasuk dalam bidang rantai pasokan. Pemerintah Australia telah berkomitmen terhadap investasi finansial yang proporsional dalam basis industri kapal selam Inggris untuk mempercepat proses produksi SSN-AUKUS (U.S. Embassy in Canberra, 2023).

AUKUS menjadi batu loncatan bagi Pemerintah Inggris untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya menjadi negara eropa paling berpengaruh di Indo-Pasifik. Perilaku Pemerintah Inggris yang merupakan Langkah dalam mendukung berdirinya AUKUS di Indo-Pasifik yaitu menempatkan beberapa kecanggihan militer Inggris seperti *U.S. Destroyer, U.S. Marine Corps F-35 Aircraft, Dutch Frigate*, serta beberapa kapal patrol angkatan laut di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, terbentuknya AUKUS juga merupakan bagian dari

keinginan Pemerintah Inggris untuk mempererat hubungannya dengan Australia (Indra Susila, 2023).

4.3.4. Kepentingan Australia dalam Pakta AUKUS

Sejak dulu Pemerintah Australia telah mengarahkan kepentingan keamanannya kepada Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini terlihat dari banyaknya Pemerintah Australia terlibat dalam aliansi keamanan bersama dua sekutu besarnya tersebut seperti *Five Eyes*, ANZUS, FPDA, dan QUAD. Pemerintah Australia terus menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara tersebut untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya. Selain itu, Pemerintah Australia merupakan negara persemakmuran Inggris sehingga memiliki banyak keterkaitan sejak awal berdirinya pemerintahan negara Australia.

Negara dengan kekuatan besar lain yang juga menjalin hubungan kerja sama dengan Australia yaitu Tiongkok, kerja sama ekonomi antara keduanya telah terjalin dengan baik sejak tahun 1980. Hubungan yang terjalin antara Pemerintah Australia dan Tiongkok pada dasarnya merupakan pengaruh geopolitik dan strategis global. Pada tahun 2014, pemimpin negara Tiongkok dan Australia sepakat menggambarkan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut sebagai kemitraan strategis yang komprehensif (Hanum, 2020). Tiongkok bangkit menjadi negara dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat sejak berakhirnya Perang Dingin. Tidak hanya ekonomi, perkembangan Tiongkok juga terus meningkat dalam aspek militer bahkan mulai melakukan berbagai aksi dominasi di kawasan Indo-Pasifik.

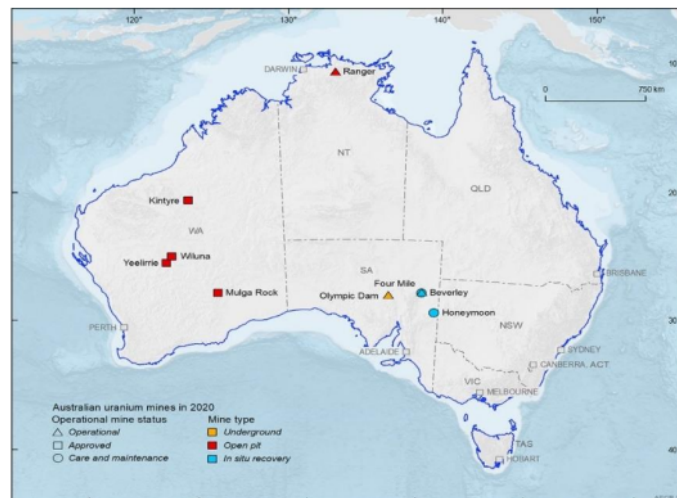
Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam aspek ekonomi dan keamanan tentunya juga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Australia di Indo-Pasifik. Pemerintah Australia sendiri memandang bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan yang memiliki peluang dan tantangan strategis besar di masa depan. Hal tersebut menjadi alasan Pemerintah Australia untuk terlibat lebih jauh dalam pengambilan peran dan penyebaran pengaruh yang dimulai dengan menjalin berbagai kerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia juga telah memiliki 3 buku putih kebijakan yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai strategi luar negeri Australia di Indo-Pasifik yaitu DWP (*The 2016 Defence White Paper*), FPWP (*The 2017 Foreign policy White Paper*) dan DSU (*The 2020 Defence Strategic Update*).

Pemerintah Australia kemudian terlibat dalam aliansi keamanan trilateral terbesar di Indo-Pasifik bersama dengan dua negara mitranya yaitu Amerika Serikat dan Inggris yang dikenal dengan AUKUS. Dalam pakta keamanan ini, Pemerintah Australia merupakan negara penerima fasilitas teknologi propulsi nuklir untuk armada angkatan laut yang tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan sistem keamanan dan pertahanan. Australia diperkirakan akan mengalami perkembangan secara signifikan dalam bidang keamanan dengan menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir.

Australia memiliki *Economic Demonstrated Resources* (RDE) uranium terbesar di dunia sekaligus menjadi negara produsen uranium terbesar ketiga di dunia.

Sebanyak 29% cadangan uranium dunia terdapat di Australia, disusul oleh Kazakhstan sebanyak 13%, kemudian Rusia dan Kanada sebanyak 9% (Geoscience Australia, 2021). Uranium merupakan bahan baku utama dalam pengolahan tenaga nuklir. Meskipun begitu, Australia tidak termasuk menjadi salah satu negara yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir. Pemerintah Australia memiliki kebijakan yang melarang penggunaan uranium yang diproduksi di dalam negeri untuk aplikasi militer. Aturan itu juga mencegah Pemerintah Australia menggunakan uraniumnya untuk dijadikan bahan bakar SSN-AUKUS yang akan datang.

Gambar 4.3 Uranium dan Thorium Australia 2019



Sumber: Geoscience Australia, 2021.

Pemerintah Australia telah menanda tangani dua perjanjian terkait tenaga nuklir yaitu NPT (*Non-Proliferasi Nuklir*) pada tahun 1968 dan Perjanjian Raratonga pada tahun 1986 (Sanders, 2023). Perjanjian NPT pada dasarnya mewajibkan negara-negara pemilik senjata nuklir dalam hal ini yaitu AS, Inggris, Prancis, Tiongkok dan Rusia

untuk tidak mewariskan senjata maupun teknologi nuklir kepada negara selain mereka. Namun, perjanjian ini memiliki ketentuan khusus yang menyatakan bahwa penyediaan bahan nuklir untuk tujuan damai diperbolehkan dan prosesnya harus dibawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional. AUKUS sendiri telah menekankan bahwa ¹⁶ kapal selam bertenaga nuklir yang akan dimiliki oleh Australia hanya akan membawa senjata konvensional bukan senjata nuklir seperti yang dilarang dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

Selanjutnya Perjanjian Raratonga merupakan perjanjian regional yang mendukung perjanjian NPT. Negara-negara yang telah menanda tangani perjanjian ini sepakat untuk mempertahankan zona bebas senjata nuklir di Pasifik Selatan. Menurut perjanjian Raratonga, AUKUS tidak melanggar kesepakatan yang terdapat dalam isi perjanjian tersebut. Namun, Pemerintah Australia diwajibkan secara khusus untuk menangani limbah nuklir yang dihasilkan selama proses penggunaan maupun pengoperasian SSN-AUKUS (Sanders, 2023).

Sebagai bagian dari komitmen terhadap pengelolaan nuklir, Pemerintah Australia telah berkomitmen untuk mengelola semua limbah radioaktif yang dihasilkan melalui program kapal selam bertenaga nuklir, termasuk bahan bakar nuklir bekas di Australia. Pemerintah AS dan Inggris juga akan membantu Pemerintah Australia dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan limbah berdasarkan pengalaman di dalam negeri mereka. Pemerintah Australia akan mengelola bahan-bahan tersebut sesuai

dengan aturan non-proliferasi nuklir serta kewajiban dan komitmen internasional lainnya.

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Australia untuk menepati komitmen tersebut diantaranya Australia sebagai ⁴⁰ negara yang tidak memiliki senjata nuklir tidak akan berupaya untuk memperoleh senjata nuklir, Pemerintah Australia tidak akan memproses ulang bahan bakar bekas sebagai bagian dari program ini, Pemerintah Australia tidak akan memproduksi bahan bakar nuklirnya sendiri yang mana bahan bakar akan diperoleh dari AS dan Inggris dalam bentuk unit tenaga listrik yang lengkap sehingga tidak memerlukan pengisian bahan bakar selama masa pakainya. Selain itu bahan bakar nuklir yang diterima Australia tidak dapat digunakan dalam senjata nuklir tanpa pengolahan kimia lebih lanjut serta memerlukan fasilitas yang tidak dimiliki maupun akan dicari oleh Pemerintah Australia.

¹¹ Program pengadaan kapal selam bertenaga nuklir yang disebut dengan SSN-AUKUS ini akan terjadi dalam kerangka Perjanjian Perlindungan Komprehensif (CSA) dan Protokol tambahan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Direktur Jenderal IAEA telah melaporkan kepada negara-negara anggota bahwa ia yakin para mitra AUKUS berkomitmen untuk memastikan terpenuhinya standar tertinggi non-proliferasi dan upaya perlindungan serta menyatakan kepuasannya terhadap keterlibatan dan transparansi yang ditunjukkan oleh ketiga negara (U.S. Embassy in Canberra, 2023).

Pakta keamanan trilateral AUKUS merupakan kerangka kerja sama kawasan yang paling signifikan bagi Pemerintah Australia. Hal ini didukung oleh kerja sama dalam pengembangan kapabilitas militer Angkatan Laut Australia yang sangat komprehensif. Jalan menuju Pemerintah Australia memperoleh SSN-AUKUS akan menjadi tanggung jawab seluruh negara anggota. Kapal selam SSN-AUKUS Australia akan dibangun di *Submarine Construction Yard* masa depan Australia di Adelaide. Pemerintah Australia juga telah mempersiapkan berbagai lahan tambahan, termasuk yang berlokasi tidak jauh dari *Osborne North Shipyard* di Australia Selatan.

Program pengadaan SSN-AUKUS ini juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan Australia melalui tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan, pusat pembangunan kapal selam ini akan mempekerjakan ribuan pekerja di lokasi pada puncaknya. Secara keseluruhan, usaha ini akan mencapai dua kali lipat permintaan personel di galangan kapal bawah laut Australia yang diperkirakan sebelumnya dan akan didukung oleh investasi signifikan pada kapasitas dan infrastruktur industri dalam negeri Australia. Untuk mewujudkan armada bawah laut yang tangguh dan berkualitas, Pemerintah Australia juga akan mengadakan pelatihan tambahan. Pemerintah Australia perlu melakukan banyak persiapan sebelum dapat secara resmi memiliki dan mengoperasikan teknologi kapal selam bertenga nuklirnya sendiri. Persiapan tersebut berkaitan dengan infrastruktur, tenaga kerja, kemampuan industri dan pengelolaan limbah selama proses pembuatan kapal selam berlangsung.

Secara teknis pakta keamanan AUKUS dapat diimplementasikan sebagai pengembangan kapabilitas militer Australia beserta fasilitas pendukungnya yang kemudian diklaim sebagai wadah untuk meningkatkan keamanan di Kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini berfokus pada dua hal yaitu pengadaan ⁵ kapal selam bertenaga nuklir yang dipersenjatai secara konvensional serta pengembangan kekuatan militer tingkat tinggi yang terdiri dari beberapa aspek.

Setelah pengadaan ¹⁶ kapal selam bertenaga nuklir yang direncanakan akan dapat dioperasikan oleh Angkatan Laut Australia dan Inggris, AUKUS akan melanjutkan program yang berfokus pada pengembangan kemampuan tingkat tinggi bawah laut melalui AURAS (*The AUKUS Undersea Robotics Autonomous System*). Ketiga negara akan menciptakan kendaraan otonom bawah laut yang direncanakan akan menjadi kekuatan signifikan bagi Angkatan Laut Australia.

4.4. Optimalisasi Upaya Australia dalam Pemenuhan Kepentingan Keamanan Melalui Pakta AUKUS

Pada dasarnya setiap negara memiliki sifat *selfish* di mana mereka hanya akan melindungi kepentingan nasionalnya. Bahkan meskipun pada akhirnya diperlukan untuk membuat aliansi dan bekerja sama dengan pihak lain, itu semua dilakukan demi pencapaian kepentingan mereka sendiri. Sehingga dalam sebuah kerja sama internasional, masing-masing pihak pasti akan memanfaatkan kerja sama tersebut untuk memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya. Sebelum memutuskan untuk terlibat dalam sebuah kerja sama atau membentuk aliansi dengan pihak lain,

tentunya negara mempunyai faktor-faktor yang mendorong terciptanya kebutuhan akan hal tersebut.

Adanya perubahan struktur internasional atau munculnya pihak eksternal yang berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan sebuah negara akan memicu keinginan lebih besar untuk melindungi kepentingan nasional. Hal tersebut juga akan memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Untuk menghadapi ancaman tersebut, negara perlu meningkatkan kapabilitas keamanan dan pertahanannya. Faktor seperti itulah yang menjadi pendorong Pemerintah ¹⁷ Australia, Inggris dan Amerika Serikat untuk membentuk pakta keamanan AUKUS di kawasan Indo-Pasifik.

² Budaya strategis Pemerintah Australia identik dengan mempunyai “teman baik dan teman kuat”, dalam hal ini cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya adalah dengan ² menghadapi ancaman yang nyata dan memperkuat pertahanan nasional melalui pembentukan aliansi dengan negara-negara yang merupakan sekutu besarnya (Ali, n.d.). Amerika Serikat dan Inggris merupakan dua negara berpengaruh di dunia yang juga merupakan sekutu besar bagi Pemerintah Australia, hal ini dibuktikan dengan adanya banyak kerja sama internasional dalam bidang keamanan yang terjalin diantara ketiganya.

Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan militer baru yang melakukan upaya dominasi di Indo-Pasifik menuai banyak kekhawatiran dari negara-negara di kawasan tersebut, Australia termasuk salah satu negara yang merasakan dampaknya. Agresivitas

Tiongkok di Laut Cina Selatan, Proyek *Mega Belt and Road Initiative*, serta berkurangnya tingkat kekuatan dan pengaruh AS sebagai sekutu Australia di Indo-Pasifik tentunya mempengaruhi sebagian besar pengambilan kebijakan luar negerinya.

Pemerintah Australia perlu mengoptimalkan kebijakan luar negerinya dengan cara yang tepat untuk menghadapi tantangan Tiongkok di Indo-Pasifik yang juga telah menjadi ancaman bagi Pemerintah Australia sendiri. Melalui pakta AUKUS Pemerintah Australia akan memaksimalkan upaya dalam memenuhi kepentingan keamanan nasionalnya. Setiap pihak dalam kerja sama tidak hanya akan mendapatkan keuntungan absolut dari kerja sama tersebut, melainkan ada keuntungan relatif yang diperoleh masing-masing anggota. Selain mempergunakan pakta AUKUS sebagai respon dari kebangkitan kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik seperti dua mitranya, Pemerintah Australia perlu memanfaatkan pakta AUKUS sebagai batu loncatan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan keamanan nasionalnya.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Australia dalam memaksimalkan pencapaian kepentingan keamanan melalui pakta AUKUS dimulai dengan berperan aktif selama diskusi perencanaan pembuatan program yang akan dijalankan AUKUS. Pemerintah Australia juga berkomitmen akan menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap segala fasilitas dan akses yang diperoleh Pemerintah Australia melalui pakta keamanan tersebut. Melalui AUKUS, Pemerintah Australia akan memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. SSN-AUKUS akan menjadi kapal selam serang terbesar, tercanggih dan terkuat yang

pernah dioperasikan oleh Pemerintah Australia dengan menggabungkan sensor, desain dan persenjataan terkemuka dunia dalam satu kapal. Sebelum dianggap mampu memproses pembuatan dan mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir miliknya sendiri, personel Australia akan menerima pelatihan dari Angkatan Laut AS dan Inggris. Pemerintah Australia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan secara aktif akan terus mengirimkan personelnnya dalam jumlah besar untuk meningkatkan kapabilitas kekuatan militernya.

Pada 23 Agustus 2023, kontingen pertama personel AUKUS disambut di galangan kapal Angkatan Laut Pearl Harbour dan Fasilitas Pemeliharaan Menengah. Personel Angkatan Laut Australia telah bergabung dengan seluruh kontingen dari AS dan Inggris sebagai bagian dari Tim Verifikasi Lanjutan (AVT). Para ahli di bidang pemeliharaan kapal dari ketiga negara bergabung untuk mempelajari keterampilan pemeliharaan dan industri yang diperlukan untuk membentuk SRF-West (*Submarine Rotational Force-West*). SFR-West akan menetapkan kehadiran bergilir satu kapal selam kelas Astute Inggris pada awal tahun 2027 hingga empat kapal selam kelas Virginia AS di HMAS Stirling (Royal Australian Navy, 2022). Kontingen Australia akan menjadi personel awal yang akan membangun pemahaman rinci tentang keterampilan khusus yang dibutuhkan Australia untuk membangun tenaga kerja pemeliharaannya.

Dalam siaran pers oleh Kementerian Pertahanan Inggris Ben Wallace dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 31 Agustus 2022 di galangan Kapal

Barrow in Furnes, disebutkan bahwa penempatan personel Australia di AS dan Inggris tersebut akan mempercepat proses pelatihan agar Australia dapat mengoperasikan SSN-AUKUS segera setelah dikirimkan (Hill, 2023). Pemerintahan Inggris dan AS telah menyambut pesonel Angkatan Laut Australia untuk mengikuti pelatihan nuklir khusus dan Pemerintah Australia akan mengirim lebih banyak lagi personel pada tahun berikutnya.

Selain akan mendapatkan akses menuju peningkatan teknologi dan kemampuan militer yang lebih maju melalui AUKUS, Pemerintah Australia juga dapat mempercepat pencapaian strategi luar negerinya untuk meningkatkan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dengan cara terlibat dengan dua negara besar paling berpengaruh di Indo-Pasifik saat ini. Pemerintah Australia terus berupaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas dari fasilitas pembuatan dan pemeliharaan kapal selam agar proses pembuatan SSN-AUKUS dapat dilakukan di Australia. Proses pembuatan kapal selam yang dilakukan di dalam negeri akan membuka ribuan lapangan pekerjaan dan akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Australia itu sendiri.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Perubahan struktur baik dalam skala regional maupun internasional akan memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara. Adanya fenomena atau kemunculan pihak eksternal yang berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan negara, tentunya akan menjadi pendorong untuk melakukan upaya peningkatan kapabilitas agar tetap bisa mencapai dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Kemudian negara juga bersifat *selfish* dimana mereka selalu mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional diatas apapun. Meskipun suatu negara harus terlibat dalam sebuah aliansi, hal itu hanyalah merupakan bagian dari upaya pencapaian kepentingan nasionalnya.

Dalam strategi politik luar negerinya, Pemerintah Australia identik dengan memiliki “teman baik dan teman kuat” dimana Pemerintah Australia kerap mencapai kepentingan nasionalnya melalui pembentukan aliansi dengan negara-negara berpengaruh yang merupakan sekutu besarnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyaknya keterlibatan Pemerintah Australia dalam berbagai kerja sama keamanan bersama Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris sebagai sekutu besarnya.

Kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan baru di Indo-Pasifik menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang kemudian mendorong ketiga negara tersebut membentuk sebuah pakta keamanan bernama AUKUS, dimana pakta tersebut akan menjalankan program pengadaan kapal selam bertenaga nuklir pertama bagi Pemerintah Australia serta diiringi dengan berbagai program peningkatan kapabilitas kekuatan militer bagi ketiga negara anggota. Pemerintah Australia tidak hanya memanfaatkan AUKUS sebagai respon atas agresivitas Tiongkok di Indo-Pasifik seperti dua mitranya, namun juga menjadikan pakta trilateral ini sebagai batu loncatan bagi pencapaian kepentingan nasionalnya.

Upaya Pemerintah Australia dalam mengoptimalkan pakta AUKUS untuk pemenuhan kepentingan nasionalnya dimulai sejak periode awal, di mana Pemerintah Australia berperan sangat aktif pada setiap pertemuan yang membahas mengenai program kerja AUKUS. Selain akan memperoleh ¹¹ kapal selam bertenaga nuklir yang disebut dengan SSN-AUKUS, pakta ini juga membantu Pemerintah Australia dalam mewujudkan strategi politik luar negerinya untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia juga tidak menyalahgunakan kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas Angkatan Lautnya dengan terus mengirimkan personel untuk menerima pelatihan ke pusat pelatihan Angkatan Laut AS dan Inggris. Pemerintah Australia terus berupaya meningkatkan fasilitas pusat pembangunan dan pemeliharaan kapal selam di dalam negeri untuk mempercepat kepemilikan SSN-

AUKUS sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya melalui tersedianya ribuan lapangan pekerjaan baru.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan upaya ¹⁴ Optimalisasi Pakta AUKUS dalam Mendukung Pemenuhan Kepentingan Keamanan Australia, penulis sadar akan keterbatasan dalam penelitian ini sehingga penulis mengajukan beberapa saran terkait penelitian ini, yaitu:

- 1) Menjadi bahan kajian bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang memiliki minat untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai kepentingan Pemerintah ¹⁷ Australia, Inggris dan Amerika Serikat dalam pakta keamanan AUKUS.
- 2) Menjadi referensi bagi para penstudi Hubungan Internasional yang ingin berkonsentrasi dalam implementasi lebih lanjut mengenai dinamika politik dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, R. F. (n.d.). *STRATEGI KEAMANAN AUSTRALIA TERHADAP INDO-PASIFIK*.
- Asutralian Government Defence. (2023). *Indo-Pasifik Endeavour*. Asutralian Government Defence. <https://www.defence.gov.au/operations/indo-pacific-endeavour>
- Barrett, S. (1999). Scott Barrett-1999.pdf. *Journal of Theoretical Politics*, 11(3), 520–541. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0951692899011004004>
- Biden, J. R. (2021). *INTERIM NATIONAL SECURITY STRATEGIC GUIDANCE*. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf>
- Brooke-Holland, L., Curtis, J., Mills, C., & Garraway, A. (2021). *The AUKUS Agreement*. *October*, 1–27. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9335/>
- Buchanan, A. (2005). In the national interest. In *The Political Philosophy of Cosmopolitanism* (pp. 110–126). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614743.009>
- Cheng, M. (2022). AUKUS: The Changing Dynamic and Its Regional Implications. *European Journal of Development Studies*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.1.63>
- CSIS. (2022). Proyeksi Hubungan Indonesia-Australia di Era Kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese. In CSIS (Ed.), *CSIS Media Briefing* (p. 5).
- Delanova, M. O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 259–285. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>
- Geoscience Australia. (2021). Uranium dan Thorium Sumber Daya Komoditas Energi Australia 2021. *Uranium Dan Thorium Sumber Daya Komoditas Energi Australia 2021*, 1–27. <https://www.ga.gov.au/digital-publication/aecr2021/uranium-and-thorium>
- Grasa, R., & Costa, O. (n.d.). *WHERE HAS THE OLD DEBATE GONE? REALISM, INSTITUTIONALISM AND IR THEORY*. www.cidob.org

- Hanum, Nabila. (2020). *KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DALAM MERESPON DOMINASI CHINA PADA KERANGKA INDO-PASIFIK TAHUN 2013-2018*. <https://worldview.stratfor.com/>
- Hill, John. (2023). Naval Technology - Australian personnel to join US and UK navies in 2023. *Naval Technology*, 1–7. <https://www.naval-technology.com/news/australian-personnel-to-join-us-and-uk-navies-in-2023/?cf-view&cf-closed>
- Indo-Pasifik Defense Forum. (2019, November). Peran Australia di Indo-Pasifik. *USINDOPACOM*. USINDOPACOM
- Indra Susila, Hardian. (2023). *Kepentingan Kerja Sama Keamanan Trilateral Australia, United Kingdom, dan United State (AUKUS) Tahun 2021* [Kualitatif, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68659>
- NCSC. (2016). *FIVE EYES INTELLIGENCE OVERSIGHT AND REVIEW COUNCIL (FIORC)*. Office of the Director of National Intelligence.
- O'Neill, K., Balsiger, J., & VanDeveer, S. D. (2004). Actors, norms, and impact: Recent international cooperation theory and the influence of the agent-structure debate. *Annual Review of Political Science*, 7(Jervis 1999), 149–175. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.7.090803.161821>
- Rizky Mardhatillah Umar, A. (2017). The National Interest in International Relations Theory. *Global South Review*, 1(2), 185. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28841>
- Rousseau, D. L. (1999). Relative or Absolute Gains: Beliefs and Behavior in International Politics. *Political Science*, July, 1–39.
- Royal Australian Navy. (2022). *The AUKUS Nuclear-Powered Submarine Pathway: a partnership for the future*. <https://www.navy.gov.au/>
- Sanders, Lauren. (2023). *If AUKUS is all about nuclear submarines, how can it comply with nuclear non-proliferation treaties?* <https://www.ansto.gov.au/education/nuclear->
- Snidal, D. (1991). Relative Gains and the Pattern of International Cooperation. *American Political Science Review*, 85(3), 701–726. <https://doi.org/10.2307/1963847>

- The White House. (2021). Joint Leaders Statement on AUKUS. *Press Breavings*, 1. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/15/joint-leaders-statement-on-aukus/>
- U.S. Embassy in Camberra. (2023). AUKUS Joint Leaders Statement. *FACT SHEET: TRILATERAL AUSTRALIA-UK-US PARTNERSHIP ON NUCLEAR-POWERED SUBMARINES*, 1–7. <https://au.usembassy.gov/aukus-joint-leaders-statement/>
- Vassilev, George. (2007). *International Cooperation under Anarchy and Relative Gains Constraints INTRODUCTION*.

OPTIMALISASI PAKTA AUKUS DALAM MENDUKUNG PEMENUHAN KEPENTINGAN KEAMANAN AUSTRALIA

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	kabar24.bisnis.com Internet Source	1%
4	jurnalintelektiva.com Internet Source	1%
5	www.liputan6.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
7	www.harianaceh.co.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1%
9	ejournal.fisip.unjani.ac.id Internet Source	<1%

10	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.antaranews.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
13	www.tribunnews.com Internet Source	<1 %
14	akademik.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.stiegici.ac.id Internet Source	<1 %
16	ji.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
17	era.id Internet Source	<1 %
18	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
19	ipdefenseforum.com Internet Source	<1 %
20	www.pcdstudiescenter.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Defense University Student Paper	<1 %

22	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	<1 %
23	news.detik.com Internet Source	<1 %
24	etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	<1 %
26	batam.tribunnews.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
28	Anil Sooklal. "The IORA Outlook on the Indo-Pacific: building partnerships for mutual cooperation and sustainable development", Journal of the Indian Ocean Region, 2023 Publication	<1 %
29	repository.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
30	journal.unifa.ac.id Internet Source	<1 %
31	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
32	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %

33	docplayer.info Internet Source	<1 %
34	www.scilit.net Internet Source	<1 %
35	blog.pluang.com Internet Source	<1 %
36	ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id Internet Source	<1 %
37	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
38	id.123dok.com Internet Source	<1 %
39	docobook.com Internet Source	<1 %
40	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On